

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TIONGKOK –  
INDIA DI WILAYAH HIMALAYA PASCA PERJANJIAN 2005 HINGGA  
DOCKLAM STANDOFF 2017**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Bayu Kurniahadi Pranoto**

**14323024**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TIONGKOK –  
INDIA DI WILAYAH HIMALAYA PASCA PERJANJIAN 2005 HINGGA  
DOCKLAM STANDOFF 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan  
Internasional Pada Program Strata 1 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia



**Oleh:**

**Bayu Kurniahadi Pranoto**

**14323024**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN CHINA – INDIA  
DI WILAYAH HIMALAYA PASCA PERJANJIAN 2005 HINGGA  
DOCKLAM STANDOFF 2017**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Dewan Penguji

1. Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S
2. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
3. Enggar Furi Hardianto S.IP., M.A.

Tanda Tangan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Bayu Kurniahadi Pranoto  
No. Mahasiswa : 14323024  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan China-India di Wilayah Himalaya Pasca Perjanjian 2005 hingga Docklam Standoff 2017

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'NETERAI TEMPEL', 'ECAF571407765', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

Bayu Kurniahadi Pranoto

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi.....	8
1.5 Cakupan Penelitian.....	9
1.6 Kajian Pustaka.....	9
1.7 Kerangka Teori.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	20
1.8.1 Metode Kualitatif.....	20
1.8.2 Subjek Penelitian.....	21
1.8.3 Alat Pengumpul Data.....	21
1.8.4 Proses Penelitian.....	21
BAB II SENGKETA PERBATASAN ANTARA TIONGKOK DAN INDIA DI WILAYAH HIMALAYA.....	23
2.1 Wilayah Sengketa Perbatasan.....	24
2.1.1 Sektor Timur.....	25
2.1.2 Sektor Tengah.....	27
2.1.3 Sektor Barat.....	28
2.2. Dinamika Negosiasi China-India atas Kasus Sengketa Perbatasan Periode 1954 – 2004.....	29
2.2.1. Panchsheel Agreement.....	29
2.2.2. Perjanjian antara China dan Pakistan tentang Penyelesaian Sengketa Perbatasan 31	
2.2.3 Revitalisasi Hubungan Bilateral Pasca 15 tahun Kekosongan Diplomatik (1960-1975).....	32
2.2.4 Perjanjian Pembentukan Joint Working Group untuk membahas Masalah Perbatasan.....	33

2.2.5 Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control .....	36
2.2.6 Agreement on Confidence Building Measures in Military Fields along the LAC in the India-China Border Area.....	37
2.2.7 Pertemuan China dan India pasca Perjanjian 1993 dan 1996 .....	38
2.2.8 Agreement on Adopting the "Forward Looking" Approach and forming an Expert Group at the JWG to Resolve Border Disputes and Clarification of LACs and Inter-Military CBMs .....	39
2.2.9 Agreement and Declaration of the Principles of Comprehensive Relations and Cooperation between India and China. ....	40
2.2.10 Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question.....	44
2.2.11 Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of India and the Ministry of National Defence of the People's Republic of China for Exchanges and Cooperation in the field of Defence 2006 .....	45
2.2.12 Point Strategy in A Joint Declaration on Further Developing the Strategic and Cooperative Partnership between China and India .....	45
2.2.13 The Shared Vision of India and China for the 21 <sup>st</sup> Century 2008.....	46
2.2.14 Joint Communique of the Republic of India and the People's Republic of China 2010.....	46
2.2.15 Agreement on the Establishment of a Working Mechanism on Consultation a Coordination on India-China Border Affairs 2012 .....	47
2.2.16 A Vision for Future Development of China-India Strategic and Cooperative Partnership 2013 .....	49
2.2.17 Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on Border Defense Cooperation Agreement (BDCA) .....	49
2.2.18 China-India Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity 2014 .....	50
<b>BAB III FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TIONGKOK-INDIA.....</b>	<b>52</b>
3.1 Material Linkage .....	54
3.1.1 Kurangnya Implementasi <i>Confidence Building Measures</i> (CBMs).....	54
3.1.2 Pengaruh Prestise Negara (State Prestige) .....	60
3.2 Political Linkage .....	67
3.2.1 Pengaruh Tibet dalam Sengketa Perbatasan Tiongkok dan India .....	68

3.2.2 Pengaruh Pakistan dalam Hubungan Bilateral Tiongkok-India.....	73
3.3 Bargaining Linkage.....	78
3.3.1 Pengaruh Ekonomi dan Perdagangan.....	78
3.4 Organisational and Procedural Linkage.....	81
3.4.1 Posisi South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) dalam Sengketa Perbatasan India-Tiongkok.....	81
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Rekomendasi dan Saran .....	91
Daftar Pustaka.....	92

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Joint Working Group.....	34
<b>Tabel 2.2</b> Special Representative Meeting (SRM).....	42
<b>Tabel 2.3</b> WMCC on India-China Border Affairs.....	47



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Wilayah Sengketa Perbatasan.....	24
<b>Gambar 2.2</b> Sektor Timur.....	25
<b>Gambar 2.3</b> Sektor Tengah.....	27
<b>Gambar 2.4</b> Sektor Barat.....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak tahun 1949, Tiongkok telah berbagi perbatasan dengan negara tetangganya bahkan 14 negara diantaranya terjadi sengketa. Namun beberapa kasus sudah terselesaikan seperti dengan Myanmar (1960), Nepal (1961), Korea Utara (1962), Mongolia (1962), Pakistan (1963), Laos (1991) bahkan Vietnam (1999) dan Rusia (1991-94) (Richards, 2015). Penyelesaian sengketa mayoritas lebih menekankan kepada nilai hukum internasional yang damai dan pendekatan diplomasi, terkecuali Vietnam dan Rusia dengan jalan militer (Hongyi, 2009, p. 487).

Hubungan diplomasi kedua negara ini dimulai sejak 31 Desember 1949 bertepatan ketika India mengakui Tiongkok sebagai negara komunis. Namun satu dekade hingga 8 September 1959 menjadi fase buruk bagi kedua negara khususnya mengenai isu perbatasan. Kawasan perbatasan dengan India menjadi salah satu sengketa perbatasan yang belum diselesaikan oleh Tiongkok hingga saat ini (Kumar M. , 2015, p. 21).

Kawasan perbatasan yang disengketakan terbagi menjadi 3 sektor besar yakni Sektor Timur, Tengah dan Barat. Sektor Timur terdiri dari seluruh area terluar perbatasan (Outer Line) pra 1914 dan McMahon Line. Sektor Tengah terdiri dari kawasan perbatasan yang melewati Tibet-Kashmir-Punjab dan Nepal-Tibet-Uttar Pradesh. Sementara Sektor Barat meliputi kawasan perbatasan yang melewati Aksai

Chin yang diklaim India sebagai bagian dari Ladakh dan Tiongkok sebagai bagian dari Xinjiang (Xuecheng, 2011, pp. 148-149).

Sengketa perbatasan dimulai sejak tahun 1954 ketika Tiongkok mengklaim wilayah Barahoti dan memprotes keberadaan pasukan India di wilayah tersebut. India memprotes atas klaim tersebut karena telah melanggar perjanjian Pancshheel (Ahmed, 2015, p. 212). Isi dari perjanjian tersebut mengandung lima prinsip yakni menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, tidak ada agresi militer, tidak campur tangan urusan internal, kesetaraan dan keuntungan bersama serta koeksistensi perdamaian (External Publicity Division Ministry of External Affairs Government of India, 1954).

Sengketa di wilayah Barahoti berlanjut hingga tahun 1956 dengan ekspansi klaim Tiongkok meluas ke Tunjun La dan Hupsang Khud. Pemimpin kedua negara Zhou Enlai dan Nehru bertemu untuk melakukan kesepakatan tidak menurunkan pasukan militer di area perbatasan. Namun pada tahun 1958 ekspansi Tiongkok mulai meluas ke area Ladakh, Kashmir dengan membuat bangunan permanen dan semi permanen. Aksi klaim juga berlanjut ke wilayah Laphthal dan Sangchamalla di Uttar Pradesh dengan membangun pos jaga (Ahmed, 2015, p. 213) .

Pada tahun 1959, Tiongkok mulai melanggar perjanjian Pancshheel dan berdampak pada klaim 40.000 mil dari teritorial India oleh Tiongkok. Tiongkok mulai memaksa tentara India untuk mundur dari beberapa wilayah perbatasan seperti Khinzemane, Longju dan Ladakh. Pemerintah Tiongkok menolak garis perbatasan tradisional yang disebut McMahon Line (kini Line of Actual Control) yang dibentuk ketika masa Imperialis Inggris (Ahmed, 2015, pp. 214-215). Pada tahun 1960-1961

keduanya melakukan negosiasi di 3 tempat berbeda yakni Peking, New Delhi serta Rangoon dan menghasilkan publikasi atas garis perbatasan resmi. Namun Tiongkok kembali melanggar dan memperluas ekspansi hingga ke wilayah Chemokarpola, Nyagzu dan Dambuguru. Pertempuran besar pada 20 – 21 September 1962 menjadi puncak konflik dan sekaligus menghentikan aksi klaim sementara serta memulai hubungan diplomasi secara damai. (Ahmed, 2015, p. 217).

Perubahan arah penyelesaian sengketa dimulai sejak tahun 1980 yang lebih representatif bagi kedua belah pihak. Kedua negara setuju untuk melakukan negosiasi sesuai dengan alur politik dan prinsip yang jelas untuk mencari keadilan dan solusi yang dapat diterima. Perkembangan hubungan bilateral antar dua negara besar di Asia ini dapat lebih mengatur situasi geopolitik di kawasan (Xuecheng, 2011, pp. 147-148). Terdapat 3 tahap proses diplomasi kawasan perbatasan dengan satu dekade setiap tahapnya. Pertama, pada tahun 1980 dengan momentum Perdana Menteri India Rajiv Gandhi's mengunjungi China pada Desember 1988. Kedua, tahun 1990 dengan momentum tes nuklir India pada tahun 1998 dan terakhir dengan momentum Presiden India Pratibha Patil mengunjungi China guna memperingati 60 tahun hubungan diplomatik China India pada Mei 2010 (Garver, *The Unresolved Sino-Indian Border Dispute: An Interpretation*, 2011, p. 100).

Terdapat 8 kali pertemuan untuk negosiasi antara tahun 1981 hingga 1988 yang secara keseluruhan perbincangan lebih mengarah kepada mekanisme penyelesaian sengketa. Tiongkok menerima penawaran India untuk menyelesaikannya secara bertahap dengan sistem sektor per sektor. Sistem ini dinilai India lebih efektif dengan

mengutamakan sektor yang paling mudah yakni sektor timur. Namun pada tahap akhir negosiasi tahun 1988, Tiongkok justru menunjukkan klaim kembali atas sektor timur (Singh Z. D., *After the Hiatus: India-China Border Diplomacy since the 1970s*, 2011, p. 87). Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Tiongkok pada kesepakatan yang telah dibuat.

Sejak tahun 1998 – 2003 telah dilakukan *Joint Working Group* antar delegasi kedua negara untuk merancang instrumen membantu stabilitas kawasan *Line of Actual Control* (LAC). Tahap penentuan dilaksanakan pada bulan Juni 2003 ketika Perwakilan Khusus tiap negara datang untuk memimpin 13 ronde *Special Representative Meeting* (Singh Z. D., *After the Hiatus: India-China Border Diplomacy since the 1970s*, 2011, p. 89). Hal ini merupakan langkah positif kedua negara untuk memperjelas langkah diplomasi yang dilakukan.

Pada April 2005 telah dilakukan penandatanganan sebuah kesepakatan yang mengatur tentang parameter politik dan prinsip dasar penyelesaian sengketa perbatasan. Tiongkok dan India menandatangani *Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India China Boundary Question* yang disusun sejak tahun 2003. Kesepakatan ini berisi 10 pedoman yang merupakan dasar dari pola pengaturan perbatasan secara damai dan cara menyelesaikannya (Hsu, 2008, pp. 10-11). Lima prinsip dasar yang tertulis dalam perjanjian *Panchsheel* menjadi basis dari perjanjian ini yang mewakili kepentingan kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga merupakan penekanan komitmen melaksanakan Perjanjian yang ditandatangani tahun 1993 tentang Pemeliharaan

Perdamaian dan Ketenangan di Sepanjang *Line of Actual Control* (LAC) di Wilayah Perbatasan India-China serta Perjanjian tahun 1996 tentang Langkah-Langkah Membangun Keyakinan di Lapangan Militer di sepanjang Jalur Pengendalian Aktual (Maxwell, 2014, pp. 289-290).

Sejak kesepakatan ini terbentuk, hubungan diplomasi Tiongkok-India meningkat signifikan. Pada tahun yang sama menandatangani perjanjian *Strategic Partnership for Peace and Prosperity*. Berlanjut pada tahun 2006 dideklarasikan sebagai *Sino-Indian Friendship Year* dan 2007 sebagai *Year of Friendship*. Selain itu dalam ranah sengketa perbatasan, wilayah Nathu La dibuka kembali pada 4 Juli 2006 setelah 44 tahun ditutup. Perdagangan antar dua negara juga meningkat pada tahun 2008 mencapai 38 miliar dollar Amerika yang sebelumnya tahun 1991 hanya 260 juta dollar Amerika (Huchet, 2008, p. 50).

Kesepakatan yang sudah terjalin ternyata tidak berjalan lama dengan munculnya konflik baru di kawasan perbatasan. Pada tahun 2009, Tiongkok memprotes kedatangan Perdana Menteri India Manmohan Singh ke Arunachal Pradesh karena termasuk wilayah sengketa. Kemudian pada tahun berikutnya 2010 kedua negara sama-sama menolak kunjungan dari perwakilan negara. Melihat keadaan ini, Tiongkok mengusulkan kembali rencana kesepakatan pada tahun 2013 tentang *Border Defence Cooperation Agreement* (Chansoria, *India-China Border Agreement Much Ado About Nothing*, 2014). Kesepakatan ini merupakan penekanan terhadap perjanjian 1993, 1996 dan 2005. Selain itu, kesepakatan ini dibentuk untuk memperjelas skema

definisi *Line of Actual Control* (LAC) yang berbeda antara Tiongkok ataupun India (Subramanyam, 2013).

Perundingan yang telah dilaksanakan sejak Parameter Politik dan Prinsip Panduan Penyelesaian Pertanyaan Batas Tiongkok India ditandatangani pada tahun 2005 ternyata tidak efektif. Sengketa di kawasan perbatasan masih terus terjadi bahkan kedua negara masih tegas dengan prinsipnya masing-masing. Peristiwa *Docklam Standoff* pada 28 Agustus 2017 menjadi momentum penanda kebuntuan usaha diplomasi sengketa perbatasan oleh kedua negara (Panda, a, 2017).

Klaim Tiongkok atas Docklam berdasar pada Konvensi Calcutta 1890 antara Tiongkok dengan Britain. Sementara posisi India merupakan sekutu dari Bhutan yang didasari pada A New Friendship Treaty pada tahun 2007. Bhutan meminta bantuan India untuk memandu proses diplomatik dengan Tiongkok (Bo, 2018).

*Docklam Standoff* ditandai dengan mundurnya tentara Tiongkok dan India di kawasan perbatasan Docklam. Peristiwa ini dimulai dengan perlawanan tentara India atas masuknya tentara Tiongkok *People's Liberation Army* (PLA) di kawasan perbatasan Docklam untuk membangun jalan di kawasan tersebut. Aksi protes tidak hanya dilakukan oleh India namun juga oleh Bhutan, negara yang mempunyai hak teritorial atas Docklam (Panda, b, 2017). Kemudian keadaan diperparah ketika Kementerian Luar Negeri Tiongkok merilis peta yang menggambarkan Docklam merupakan bagian dari kedaulatan Tiongkok. Selain itu Tiongkok mengeluarkan berbagai dokumen yang disebar ke media internasional termasuk tuduhan bahwa

India menggunakan Bhutan sebagai dalih intervensi diplomatik serta menyebarkan stereotip bahwa India merupakan ancaman bagi Bhutan (Sajjanhar, 2017).

Kebuntuan diplomasi antara Tiongkok dan India semakin parah seiring dengan masuknya angkatan militer di kawasan Docket. Aksi saling ancam hingga adu kekuatan militer terjadi antar kedua negara di kawasan perbatasan. Tiongkok memaksa mundur tentara India untuk keluar dari wilayah sengketa, begitupun sebaliknya. Keadaan ini kemudian mengalami kebuntuan pada 28 Agustus 2017 dan kedua negara sepakat menarik mundur militer dari kawasan tersebut untuk memulai kembali proses negosiasi secara damai (Patranobis, 2018).

Dilihat dari data dan sejarah tersebut penulis semakin tertarik untuk meneliti kegagalan dalam berbagai perundingan yang dilakukan antara Tiongkok dan India semenjak Perjanjian 2005 hingga munculnya Peristiwa *Docket Standoff 2017*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang mengenai Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan China-India maka dapat ditarik rumusan masalah:

Mengapa sengketa perbatasan China-India belum dapat terselesaikan mulai dari perjanjian 2005 hingga peristiwa *Docket Standoff* tahun 2017?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kegagalan dalam perundingan yang dilakukan Tiongkok India pada tahun 2005 hingga 2017.



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya proses penyelesaian sengketa perbatasan.
3. Untuk mengetahui usaha kedua belah pihak dalam menemukan resolusi penyelesaian sengketa.

#### **1.4 Signifikansi**

Penelitian ini penting untuk dilakukan melihat kasus ini melibatkan dua negara besar di Asia, Tiongkok dan India yang tak kunjung selesai sejak tahun 1954. Hal ini perlu dikhawatirkan karena Tiongkok sudah menyelesaikan hampir seluruh sengketa perbatasan dengan negara tetangganya terkecuali India dan Bhutan. Sengketa dua negara besar ini jika tidak cepat terselamatkan maka akan mengganggu stabilitas regional bahkan Asia.

Selain itu penelitian ini berbeda dengan beberapa artikel yang fokus pada sejarah dan awal mula terjadinya sengketa perbatasan mulai dari warisan sengketa kerajaan Inggris dan berhenti pada tahun 2005 (Maxwell, 2011, p. 71) atau membahas tentang dinamika perkembangan sengketa perbatasan hanya pada masa pemerintahan Modi di India dan Xi Jinping di China (Jha, 2017, pp. 158-159). Dalam artikel lain membahas pada sudut pandang masing-masing negara seperti sudut pandang Tiongkok terhadap sengketa perbatasan (Hellstrom & Korkmaz, 2011, pp. 11-12) begitupun dengan sudut pandang India (Eekelen, 1967, p. 79).

Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat pandangan berbeda dengan menganalisis dinamika proses perundingan antara kedua belah pihak khususnya tentang sengketa perbatasan. Namun penelitian ini lebih difokuskan kepada hal yang

menjadi kekurangan ataupun faktor yang menghambat sehingga perundingan selalu gagal. Perundingan yang dilakukan selama ini belum menemukan hasil pasca ditandatanganinya Perjanjian mengenai Parameter Politik dan Pedoman Prinsip Penyelesaian Sengketa pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang telah dibuat nyatanya belum efektif untuk menjadi landasan dalam setiap perundingan sehingga selalu gagal terbukti dengan munculnya peristiwa *Docklam Standoff 2017*. Penelitian ini nantinya akan melihat dari setiap perundingan yang dilakukan agar menjadi penelitian yang lebih rinci dan terstruktur.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini akan fokus pada analisis penyelesaian sengketa dan penyebab kegagalan dalam setiap usaha perundingan. Subyek yang terlibat yakni Tiongkok dan India serta Tibet sebagai negara yang berdiri di kawasan perbatasan kedua negara tersebut. Periode yang diambil sejak tahun 2005 ketika momentum penandatanganan dan pendeklarasian *Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India China Boundary Question*. Perjanjian ini mengatur dasar-dasar parameter politik dan panduan prinsip-prinsip yang dipakai dalam setiap perundingan yang membahas mengenai penyelesaian sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India. Peristiwa *Docklam Standoff 2017* diambil sebagai momentum terbaru penurunan hubungan diplomasi dan proses perundingan antar kedua negara.

### **1.6 Kajian Pustaka**

Xuecheng menjelesakan tentang klarifikasi *Line of Actual Control (LAC)* dan Implementasi *Confidence Building Measures (CBMs)*. LAC penting untuk dibahas

karena merupakan prinsip dasar dari garis perbatasan antara Tiongkok dan India. Pasca *Special Representatives Meetings* (SRM) tahun 1988 dan 1991, kedua negara merubah arah negosiasi dari sengketa perbatasan ke identifikasi LAC yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. SRM tentang LAC ini diadakan karena 8 ronde pertemuan yang dimulai sejak tahun 1980 hingga 1988 membahas tentang sengketa perbatasan tidak menemukan hasil. Pada tahun 1993 perjanjian tentang kepastian *Line of Actual Control* (LAC) ditandatangani oleh kedua negara. Sejak adanya kesepakatan tentang LAC ini, kedua negara bersedia menyelesaikan sengketa perbatasan dengan damai dan tenang serta meminimalisir penggunaan militer di kawasan perbatasan. Kedua negara menerapkan *Confidence Building Measures* (CBMs) dalam menjalankan kesepakatan LAC ini. Implementasi CBMs dalam kesepakatan LAC ini, kedua negara melakukan *Joint Working Group* yang diwakili diplomat serta tentara militer. Kesepakatan LAC dan implementasi CBMs menemukan tiga hasil signifikan pada sengketa perbatasan. Pertama, India menerima bahwa Tibet merupakan bagian dari Tiongkok dan melarang orang Tibet di India untuk melakukan politik anti Tiongkok. Selain itu Tiongkok juga mengakui bahwa wilayah Sikkim merupakan bagian dari kedaulatan India dengan melakukan penandatanganan kesepakatan dagang lintas batas dengan India. Kedua, Tiongkok dan India menandatangani kesepakatan parameter politik dan prinsip aturan penyelesaian sengketa perbatasan tahun 2005. Ketiga, pasca kesepakatan 2005 akan ada pertemuan representative masing-masing negara yang diadakan setiap tahun (Xuecheng, 2011, pp. 155-156).

Chansoria menekankan *Confidence Building Measures* (CBMs) sebagai langkah pasif Tiongkok India dalam setiap perundingan maupun perjanjian yang dilakukan. CBM digunakan oleh kedua belah pihak untuk menunda penyelesaian masalah sampai tujuan *balance of power* antara keduanya tercapai. *Balance of power* ini didorong dengan potensi negara berupa ekonomi maupun militer. Hal ini dipicu dengan kenaikan India sebagai kekuatan regional, walaupun Tiongkok mengakuinya namun belum siap menerima Asia sebagai multipolar. Dalam hal ini Tiongkok mengambil langkah realis yang menjalankan langkah menyerang (*offensive/ hard power*) selagi berjalannya proses diplomasi bertahan (*defensive/ soft power*). *Offensive* dengan memperkuat kekuatan nasional yang komprehensif di ranah militer dan ekonomi selagi aspek *Defensive* berjalan dengan diplomasi ataupun budaya. Konsep ini kemudian dibawa oleh Monica kedalam setiap perundingan yang sudah dilaksanakan dalam 3 fase yakni Fase 1 (1981-1987), Fase 2 (1988-2003) dan Fase 3 (2003-2016). Hal ini juga digunakan untuk menganalisis kegagalan dalam setiap perundingan ataupun kesepakatan (Chansoria, 2016, pp. 1-5).

Joshi lebih menekankan sikap keras Tiongkok terhadap upaya penyelesaian sengketa perbatasan dengan India. Hal ini juga menjadi salah satu faktor kegagalan setiap usaha perundingan yang dilakukan oleh kedua negara. Tepat setahun setelah penandatanganan perjanjian tahun 2005, aksi klaim secara keras disampaikan oleh perwakilan Tiongkok bahwa Arunachal Pradesh termasuk Tawang merupakan wilayah kedaulatan Tiongkok. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2007 yang disampaikan oleh menteri luar negeri Tiongkok. Aksi saling klaim ini memuncak pada tahun 2009 ketika

Tiongkok memblokir 2,9 miliar dollar Amerika pinjaman uang dari Asian Development Bank. Hal ini kemudian memicu India untuk meningkatkan jumlah militer dikawasan perbatasan dengan menurunkan 60.000 tentara dan 18 pesawat jet tempur yang kemudian di respon kembali oleh Tiongkok dengan menurunkan 400.000 tentara di kawasan tersebut. Perjanjian tahun 2005 menjadi kesepakatan yang mudah diacuhkan, aksi klaim ini justru telah melanggar salah satu nilai kesepakatan yakni dalam mencapai penyelesaian sengketa batas maka kedua pihak harus menjaga kepentingan populasi yang sudah menetap di kawasan tersebut. Pada tahun 2010, Kepala Angkatan Darat India Deepak Kapoor menjelaskan bahwa klaim yang dilakukan oleh masing-masing negara hanya persepsi karena tidak ada garis perbatasan pasti yang disetujui oleh kedua belah pihak. LAC yang tidak jelas menjadi alasan Tiongkok untuk terus melakukan klaim di lapangan maupun di meja perundingan (Koshi, 2011, p. 563).

Westcott lebih spesifik membahas tentang pengaruh *State Prestige* dalam sengketa perbatasan Tiongkok dan India. Dalam penelitian ini Stephen fokus ke *Interstate Border Disputes* (IBDs). Menurutnya *State Prestige* atau gengsi suatu negara adalah tangan tak terlihat yang memotivasi aktor dalam urusan internasional dan membangun hirarki yang tidak resmi dalam sistem internasional. Sifat ini nantinya akan memperkokoh dengan kepentingan masing-masing sehingga sulit untuk menemukan resolusi penyelesaian masalah hal ini terlihat dari beberapa perjanjian dan perundingan yang dilakukan selalu hilang dengan kepentingan dan gengsi masing-masing negara. Selain membahas gengsi atau *state prestige* sebagai bagian utama yang

menghambat jalannya perundingan, penelitian ini juga membahas tiga faktor lainnya yakni nilai atau simbol dari wilayah tersebut, dorongan politik domestik dan lingkungan geopolitik yang dioperasikan oleh negara. Penelitian ini akan terbagi dalam empat sesi yakni pertama, penguraian logika dari tiga faktor penyebab yang sering diidentifikasi oleh para ahli untuk menentukan perilaku negara terhadap sengketa perbatasan negara, kedua, implementasi gagasan ini ke kasus perbatasan Tiongkok dan India untuk menguraikan kekurangan sehingga penyelesaian kasus terhambat, ketiga, penguraian tentang pengaruh gengsi dalam urusan internasional khususnya IBD, keempat, membahas tentang dampak pengaruh *state prestige* memaksa kedua negara tetap keras kepala dan sulit untuk didamaikan (Westcott, 2015, pp. 1-3)

Wang lebih menjelaskan tentang keputusan negara dalam kasus ini Tiongkok dan India untuk menolak melakukan perubahan status quo dalam sengketa perbatasan. Selain itu juga melakukan pembahasan tentang alasan negara untuk lebih memilih menggunakan kekuatan militer daripada konsesi ataupun sebaliknya. Wang juga mempunyai pendapat tentang dua aspek diatas bahwa wilayah mempunyai nilai khusus untuk negara dalam pengaturan sejarah maupun tatanan internasional. Namun penerapan nilai ini akan berbeda antar satu negara dengan yang lainnya walaupun dalam satu waktu yang sama ataupun suatu negara di waktu yang berbeda. Sehingga Ke Wang mengambil hipotesa bahwa kebijakan teritorial kooperatif akan terjadi apabila nilai ekonomi wilayah meningkat dan akan mewujudkan penyelesaian sengketa damai, namun kebijakan eskalasi kemungkinan terjadi apabila nilai simbolik atau militer meningkat dan akan berujung pada penyelesaian yang cenderung lama bahkan

konflik bersenjata. Sementara untuk implementasi konsep ini di sengketa perbatasan Tiongkok-India akan dibahas dalam dua aspek besar yakni pembahasan tiap sektor (timur, tengah, barat) dan tiap nilai (ekonomi, simbolis, militer) (Wang K. , 2014, pp. 1-6).

Penelitian diatas mempunyai perbedaan yang mendasar dibandingkan penelitian yang saya tulis. Penelitian yang saya tulis membahas tentang faktor penghambat dalam dinamika proses diplomasi dan negosiasi sengketa perbatasan Tiongkok-India. Penelitian pertama yang ditulis Liu Xuecheng hanya spesifik membahas tentang Implementasi *Confidence Building Measures* (CBMs) dan klarifikasi *Line of Actual Control* (LAC). Pembahasan tersebut hanya salah satu faktor dari penghambat proses negosiasi dalam sengketa perbatasan. Penelitian kedua oleh Monika Chansoria lebih spesifik membahas tentang analisis efektifitas CBMs dalam proses negosiasi sengketa perbatasan. Sementara penelitian ketiga oleh Shashank Koshi membahas tentang sikap keras dan tidak konsisten Tiongkok terhadap upaya penyelesaian sengketa perbatasan. Penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan proses diplomasi namun hanya salah satu faktor penghambat proses diplomasi. Sementara penelitian keempat oleh Stephen Westcott membahas pengaruh *State Prestige* dalam proses negosiasi sengketa perbatasan. Terakhir penelitian kelima oleh Ke Wang lebih menekankan sikap tegas negara untuk menolak perubahan status quo dalam sengketa perbatasan.

## **1.7 Kerangka Teori**

### **Issue Linkage**

Guna mendukung argumen dalam artikel ini penulis menggunakan konsep *Issue Linkage*. Giovanni Maggi memberikan definisi atas konsep ini yakni mempertimbangkan dua bidang masalah oleh dua aktor (negara) yang mencoba bekerja sama melalui perjanjian internasional (misal perdagangan dan lingkungan). Dapat dikatakan *issue linkage* jika perjanjian yang dilaksanakan mempengaruhi satu isu sama lain (Maggi, 2016, pp. 513-514). Sementara Mugasejati juga menambahkan bahwa *Issue Linkage* merupakan cara untuk menghubungkan satu ranah isu dengan isu yang lainnya dimana masing-masing pihak akan mendapatkan apa yang mereka ingin capai. Cara ini lebih mudah dan pragmatis dalam kerjasama internasional dengan saling membuat kompensasi (Mugasejati & Rais, 2011, p. 21). Terdapat aspek yang digunakan dalam konsep ini yakni menentukan *linker* (pihak yang memberi tawaran barter isu satu dengan yang lainnya) dan *linkee* (pihak yang menerima tawaran). (Mugasejati & Rais, 2011, p. 22).

Beberapa peneliti menjelaskan konsep ini lebih kompleks dengan menggabungkan beberapa literatur di ranah isu keamanan dan kawasan perbatasan. Faktor geografis menjadi sumber keterkaitan antara dua negara untuk menghubungkan satu ranah isu dengan yang lainnya (Warner, Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse, 2016, pp. 6-7). Kemudian ketika negara mengalami kebuntuan atau ingin memperbaiki posisi tawar maka keterkaitan ini menjadi jalan untuk menghubungkannya dengan isu lain yang bahkan tidak terkait. Keterkaitan ini dapat bersifat saling kooperatif, bersifat prospektif (berupa janji atau ancaman) ataupun retrospektif (hadiah dan pembalasan). Sementara



dari sudut pandang fungsionalis maka aspek menentukan apakah hubungan antar isu ini akan mengarah pada kesepakatan atau justru ke arah *negative linkage* yang terlalu memaksa satu pihak dan akan merusak hubungan seluruhnya (Bow, 2009, pp. 1-5).

Warner juga memberikan beberapa pandangan untuk memetakan hubungan antar negara. Realisme digunakan sebagai pendekatan berdasar kekuatan, negara diasumsikan sebagai aktor utama dan bertindak secara rasional untuk mendapatkan kepentingannya. Kepentingan utama negara adalah keamanan nasional dan hal ini memotivasi negara untuk membenarkan segala tindakan demi kepentingan tersebut. Interdependensi dilihat sebagai hal yang negatif dalam realisme karena negara yang mempunyai kekuatan lebih besar akan memaksakan kepentingannya terhadap negara lain. Sementara Liberalisme digunakan sebagai pendekatan berdasar kepentingan yang menempatkan kekuasaan atau hegemoni dalam posisi sekunder dan lebih didominasi pada perhitungan rasional kepentingan nasional. Menekankan pentingnya persepsi bahwa dalam interdependensi pada akhirnya dapat disejajarkan. Namun akan cenderung pada kepatuhan aktor di satu area karena takut pembalasan di area lainnya dan memaksa pada sebuah paket kesepakatan. Terakhir Integrasionalisme yang menekankan pentingnya konteks dengan adanya berbagai keterkaitan isu dapat mengurangi kegunaan militer. Namun masalah perbatasan menciptakan hal yang samar untuk memisahkan antara politik tinggi dan rendah (Warner, 2016, pp. 2-5).

Issue Linkage tidak selalu mengarah keterkaitan yang positif (kerjasama) namun juga bisa kearah negatif (konflik). Hubungan antar negara khususnya dalam keamanan begitu kompleks dengan memprediksi kemajuan dari konflik ke kerjasama

ataupun sebaliknya. Isu yang masuk dalam agenda dilaksanakan oleh aktor yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda. Hal ini menentukan hubungan antar negara ke arah kerjasama atau bahkan konflik. Ditandai dengan tidak adanya kekuatan dan tidak ada hirarki antara satu isu dengan lainnya. Interdependensi secara asimetris dapat menguntungkan salah satu pihak, A lebih bergantung pada B dan memberikan B pengaruh untuk memberikan tekanan dan mengendalikan hubungan kedua belah pihak (Warner, 2016, p. 6).

Warner mengimplementasikan konsep ini kedalam kasus sengketa perbatasan di kawasan Sungai Meuse antara Belanda dan Belgia. Sengketa perbatasan ini dilatarbelakangi oleh aksi klaim wilayah sungai Meuse yang mengalir di sepanjang garis perbatasan kedua negara. Sungai ini disengketakan karena beberapa hal seperti jalur kapal dagang, sumber daya air bagi kedua negara (pertanian, air minum & pembangkit tenaga listrik), pusat pertambangan batubara dan kawasan pos penjagaan peredaran narkoba & sex (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 8). Perjanjian awal tentang tata kelola sungai bersama dimulai pada tahun 1863. Namun perjanjian ini tidak efektif karena pada tahun 1921 kedua negara semakin mempertegas klaim dengan membangun kanal, kanal Juliana oleh Belanda dan kanal Albert oleh Belgia. Sehingga pada tahun 1936 dibawa ke Mahkamah Internasional walaupun hasilnya klaim kedua negara ditolak (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 10).

Pasca Perang Dunia kedua aksi klaim semakin melebar dengan melibatkan isu ekonomi didalamnya. Benelux Economic Union yang dibangun untuk integrasi ekonomi negara tetangga (Belanda, Belgia, Prancis) akhirnya mulai runtuh karena aksi klaim yang terjadi di Sungai Meuse. Aksi klaim dengan pembangunan kanal semakin membesar khususnya oleh Belgia. Hal ini mengakibatkan luapan dan banjir ke wilayah Belanda. Hal ini berujung pada pembentukan perjanjian tahun 1963 yang mengharuskan Belgia memberikan kompensasi ke Belanda dan membangun bendungan penahan air (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 11).

Perpecahan di politik domestik Belgia juga mempengaruhi pengambilan keputusan khususnya dalam Konvensi Air tahun 1975. Belgia akhirnya tidak ikut menandatangani draft tersebut sehingga menghambat proses negosiasi. Hingga akhirnya UNECE melibatkan Prancis sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan urusan BEU dan Draft Konvensi Air antar kedua negara. Pada tahun 1999 dibentuk konvensi Perlindungan Meuse yakni International Commission on the Protection of the Meuse (ICMP) dan Scheldt (ICPS) yang kemudian dibentuk juga The International Meuse Commission (IMC) pada tahun 2000. Namun ini tidak efektif karena kedua negara masih belum mau bekerjasama karena dampak turunnya ekonomi akibat banjir bandang (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 12).

Aksi masa besar-besaran yang memprotes ketidakpuasan keputusan antar kedua negara yang masih mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Ekonomi semakin

menurun akibat aksi klaim yang terus terjadi di Sungai Meuse ditambah dengan luapan sungai yang mengakibatkan banjir bandang. Aksi dari Belgia diperparah dengan kisruh perpecahan kubu di politik domestik. Kemudian Bewoners Overleg Maaswerken (BOM) dibentuk sebagai forum guna membahas masalah ekonomi, AMDAL di wilayah sungai Meuse dan administratif lainnya (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse*, 2016, p. 13).

Terdapat beberapa pembagian konsep *Issue Linkage* yang dapat digunakan sebagai dasar analisis khusus membahas tentang isu kawasan perbatasan. Menurut Gupta dikutip dari (Warner, 2016, pp. 6-7)

- Material linkages/ Keterkaitan material: isu yang secara logis saling terkait sehingga tidak dapat dipisahkan atau isu yang menjadi dasar penghambat negosiasi.
- Political linkages/ Keterkaitan politik: aspirasi negara, keamanan nasional, aspirasi regional, klaim territorial.
- Bargaining linkages/ Keterkaitan tawar menawar: konstruksi buatan yang menghubungkan isu-isu yang tidak terkait.
- Organisational and procedural linkages/ Keterkaitan organisasi dan prosedural: tempat tertentu (forum, pengaturan) atau waktu negosiasi dapat mempromosikan atau menghambat kemajuan dibidang lain.
- Conceptual linkages/ Keterkaitan konseptual: definisi yang disepakati dalam satu konteks/ isu dapat mendorong kemajuan di isu lain.

Pendekatan ini tidak hanya mengarah pada isu yang terkait (*linkage*) namun juga isu yang tak terkait (*non-linkage*). Memang pada akhirnya kompleksitas ini tidak hanya menghasilkan penundaan namun juga konflik, kekakuan bahkan stagnansi. Namun tidak seluruh isu yang terlibat mempunyai pengaruh terhadap isu utama yang sedang berlangsung. Hal ini karena ambiguitas yang muncul dalam keterkaitan antar isu yakni bersifat aktif atau tidak dengan melihat posisi tawar (Warner, 2016, pp. 21-22).

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Metode Kualitatif**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif dimana metode ini menggunakan studi pustaka terhadap subjek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan kegagalan terhadap resolusi sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India sejak ditandatanganinya perjanjian tahun 2005 hingga momentum peristiwa *Docklam Standoff 2017*. Penelitian kualitatif sendiri diartikan sebagai penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan makna (*meaning*), proses dan konteks dari sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati. Kemudian menghasilkan data non numerik yakni data yang sifatnya verbal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bervariasi mulai dari yang terstruktur hingga yang tak struktur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interpretif, subjektif, impresionistik dan diagnostik (Bakry, 2016, pp. 18-19). Berdasar studi pustaka yang telah dilakukan, belum ditemukan kajian yang membahas tentang

kegagalan perundingan/ resolusi penyelesaian sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India sejak perjanjian tahun 2005 hingga peristiwa *Docklam Standoff 2017*.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah proses perundingan yang dilakukan oleh Tiongkok dan India selama periode 2005 hingga 2017 baik yang berbentuk negosiasi ataupun perjanjian yang telah ditandatangani. Sementara Tiongkok dan India berlaku sebagai aktor utama yang menjadi pelaku dalam setiap negosiasi ataupun perjanjian yang dilakukan.

### **1.8.3 Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kajian-kajian tertulis berupa buku cetak, e-book, jurnal ilmiah, dokumen resmi institusi dan artikel di internet. Penelusuran kajian pustaka khususnya buku cetak juga dilakukan di perpustakaan – perpustakaan yang ada di Yogyakarta. Kajian yang dikumpulkan tentunya akan berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari dokumen resmi pemerintah yang tersedia di laman resmi institusi seperti situs resmi pemerintahan China ataupun India yang terkait dengan penelitian ini. Sementara data sekunder berasal dari tulisan akademik berupa buku cetak, e-book, jurnal ataupun sumber yang berasal dari situs media internasional.

### **1.8.4 Proses Penelitian**

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan ketika seluruh data telah terkumpul untuk dianalisis. Tahap awal yakni melakukan pengkajian data yang terkumpul untuk

mendapatkan informasi mengenai topik yang dibahas agar dapat menemukan suatu gagasan kesimpulan. Kemudian pembagian gagasan yang terkumpul berdasar kajian data dicatat secara terstruktur. Tahap selanjutnya melakukan pembagian gagasan yang didapat dari kajian berdasar kesimpulan per pembahasan melalui beberapa sub bab yang diurutkan secara terstruktur sesuai waktu. Kemudian penjelasan secara mendetail secara deskriptif dari hasil pembagian per sub bab. Tahap terakhir hasil pemikiran atau interpretasi dari temuan dan deskripsi yang telah dilakukan sehingga terbentuk sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian (Cresswell, 2014, pp. 49-50)

**BAB II**

**SENGKETA PERBATASAN ANTARA TIONGKOK DAN INDIA DI**

**WILAYAH HIMALAYA**

Hubungan diplomatik antara India dan Tiongkok yang terbangun sejak 31 Desember 1949 telah melahirkan berbagai bentuk kerjasama maupun agresi. Hubungan bilateral keduanya juga didorong dengan potensi ekonomi yang besar dan kepentingan nasional yang dibawanya. Namun kedua negara menghadapi tantangan besar yang belum terselesaikan yakni sengketa perbatasan. Wilayah perbatasan diperdebatkan pasca ekspansi Inggris dan Rusia ke wilayah tersebut dan menempatkan Tibet sebagai *buffer zone*. Aksi klaim garis perbatasan yang dimulai sejak tahun 1954 dan memuncak pada perang tahun 1962 antara India dan Tiongkok. Saat ini hubungan bilateral lebih mengarah ke arah kerjasama pragmatis dengan stagnansi pada perkembangan hubungan dan defisit kepercayaan (Muratbekova, 2017, pp. 1-2).

Permasalahan sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India semakin beku dan sulit untuk terselesaikan. Tiongkok sudah menyelesaikan sengketa perbatasan di wilayah McMahon Line dengan Myanmar namun tidak dengan India. Tiongkok telah menyelesaikan hampir seluruh masalah perbatasan termasuk dengan negara adidaya Rusia pada tahun 2015. Proses negosiasi sudah berlangsung 64 tahun sejak tahun 1954 dan memuncak dengan peristiwa Doklam Standoff pada tahun 2017. Garis sengketa perbatasan yang luas dan kompleks di wilayah Himalaya menjadi salah satu sebab

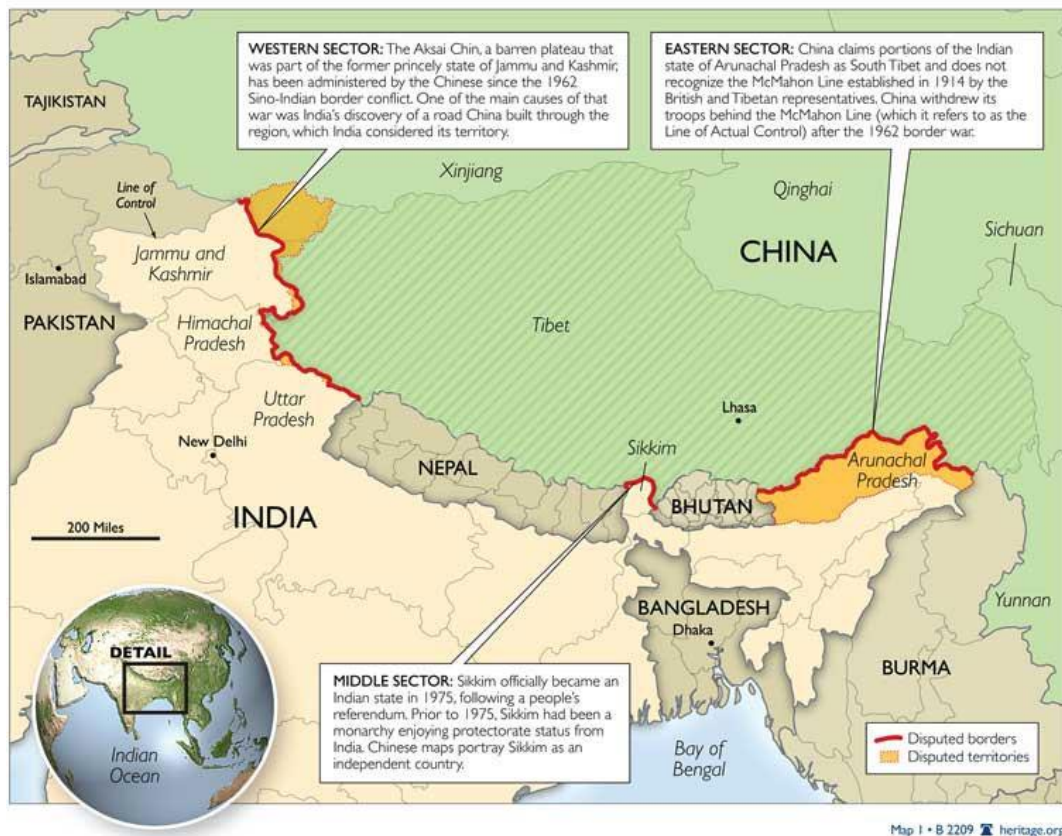


sulitnya mengontrol proses resolusi sengketa perbatasan (Thapliyal, 2010, pp. 203-204).

## 2.1 Wilayah Sengketa Perbatasan

Tiongkok maupun India mempunyai versi sendiri dalam menentukan garis perbatasan di wilayah sengketa. Hal ini bermula ketika Inggris dan Rusia tidak memberikan delimitasi ataupun demarkasi garis batas wilayah pasca ekspansi. Dampaknya masing-masing negara mempunyai kesempatan untuk memaksakan definisi garis perbatasan. Secara umum terbagi menjadi 3 wilayah besar yakni Sektor Timur, Sektor Tengah dan Sektor Barat (Shrivastava, 2016, p. 2).

**Gambar 2.1** Wilayah Sengketa Perbatasan India, China Disputed Borders



Sumber: <https://www.scmp.com/news/china/article/1239192/border-dispute-obstacle-building-trust-between-china-and-india>

### 2.1.1 Sektor Timur

Gambar 2.2 Sektor Timur



Sumber: <http://www.theshillongtimes.com/2017/05/03/new-arunachal-assembly-building-ready/>

Sektor Timur menjadi perhatian lebih dalam usaha penyelesaian sengketa antar kedua negara. Hal ini karena wilayah Arunachal Pradesh (pusat sengketa sektor timur) mempunyai pengaruh besar terhadap Dalai Lama Tibet (Kepala Budha Tibet) yang menjadi area *buffer zone*. Tiongkok menganggap bahwa India merusak hubungan bilateral dengan memberi izin Dalai Lama masuk ke wilayah Arunachal Pradesh. Ketidakkonsistenan India atas kesepakatan yang dibangun di sektor timur akan berpengaruh pada sikap Tiongkok di kawasan Sikkim (sektor tengah) dan Aksai Chin (sektor barat) (Aneja, 2017).

Wilayah yang disengketakan di sektor timur dari Sikkim hingga perbatasan dengan Myanmar dengan Arunachal Pradesh sebagai wilayah terbesarnya. Secara

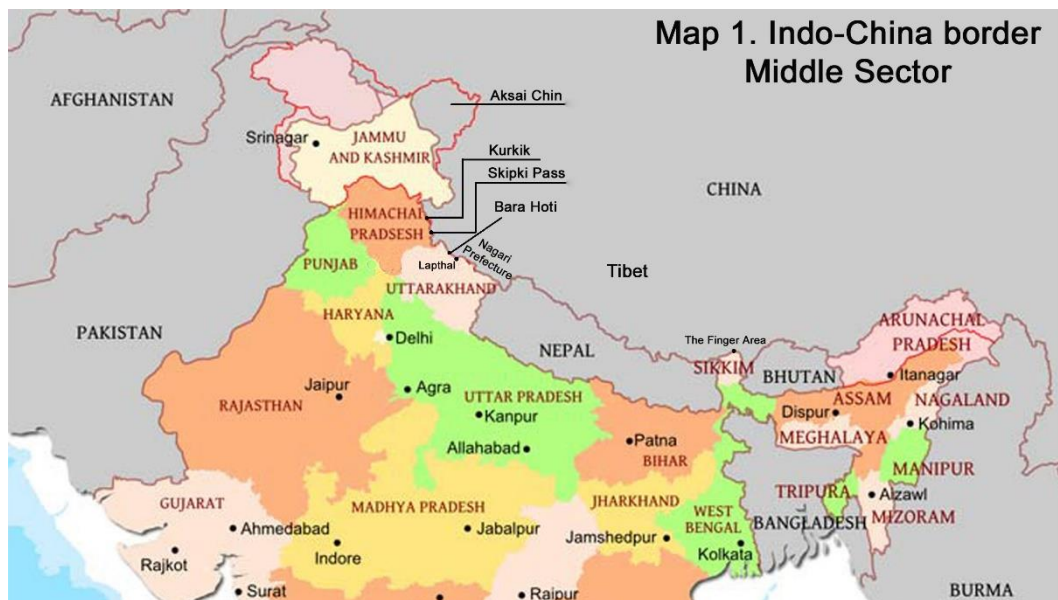
detail terdapat 5 titik utama wilayah di Arunachal Pradesh yang menjadi sengketa. Pertama Asaphila, daerah pegunungan yang terletak di sepanjang Line of Actual Control (LAC) di Upper Subansiri Division. Kedua, Longju, terletak di Upper Subansiri Division yang berseberangan langsung dengan pos militer tentara China di Migyitun, Tibet. Ketiga kawasan sungai Namka Chu, terletak di lembah Tawang District. Keempat Sumdorong Chu, merupakan kawasan anak sungai Namka Chu di Kya Pho, Tawang District. Kelima Yangtse, kawasan yang berseberangan dengan Sumdorong Chu (Gurung, 2018).

Salah satu bagian terpenting dari sengketa perbatasan di Sektor Timur adalah McMahon Line. Garis batas ini pertama kali dibuat untuk memberi batas antara Tibet dan India di Sektor Timur. Ide ini digagas pada 3 Juli 1914 dalam Perjanjian Shimla oleh seorang tentara imperial British India Lieutenant Colonel Sir Arthur Henry McMahon. Namun Tiongkok menolak perjanjian ini karena keterlibatan Tibet didalamnya. Tiongkok menganggap bahwa Tibet dibawah kedaulatan Tiongkok sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan perjanjian internasional (Rose, 1968, pp. 132-133). Garis perbatasan ini terbentang sejauh 890 km dari Bhutan di Sektor Barat ke 260 km Sektor Timur dari Brahmaputra dan terbentang sepanjang puncak Himalaya. McMahon Line tidak hanya sebagai garis perbatasan antara Tiongkok dan India namun juga sebagai aksi klaim Tibet sebagai satu keseluruhan di bawah kedaulatan Tiongkok (Kalha R. S., 2014).

### 2.1.2 Sektor Tengah

Sektor Tengah menjadi area pertama munculnya konflik perbatasan antar kedua negara. Wilayah Barahoti merupakan wilayah yang pertama kali di klaim oleh Tiongkok pada tahun 1954. Aksi klaim ini kemudian memunculkan reaksi dan protes dari India yang menyebabkan perselisihan di kawasan perbatasan hingga saat ini. Area perbatasan terbentang sejauh 625 km dari Ladakh hingga Nepal melewati kawasan Himachal Pradesh dan Uttarakhand. Garis perbatasan terbentang di kawasan puncak Himalaya kecuali area Shipki La di Himachal Pradesh dan Jadhong & Bora Hoti di Uttarakhand yang ditarik ke wilayah Tiongkok sebagai aksi klaim (Shrivastava, 2016, p. 4).

Gambar 2.3 Sektor Tengah



Sumber: <http://new.resurgentindia.org/the-history-of-sino-indian-relations-and-the-border-dispute-between-the-two-countries-3/>

### **2.1.3 Sektor Barat**

Sektor Barat menjadi wilayah kedua terbesar yang disengketakan antara Tiongkok dan India. Wilayah yang disengketakan mencapai 2152 km dari Jammu & Kashmir hingga Provinsi Xinjiang. Garis perbatasan melewati kawasan Muztagh Ata Range dan Gunung Aghil melintasi Karakoram Pass via Quara Tagh Pass serta Kunlun Range. Perbatasan ini digagas pada perjanjian Ladakh-Tibet pada tahun 1665 dan 1686 dan dikonfirmasi pada perjanjian Dogra-Ladakh 1842 oleh Kashmir, Tibet dan Tiongkok (Shrivastava, 2016, p. 3).

Area konflik sektor barat terpusat di Aksai Chin yang mengakibatkan peperangan pada tahun 1962. Aksai Chin menjadi area yang diperebutkan karena demarkasi yang tidak jelas warisan imperialisme Inggris. Terdapat dua garis perbatasan yang diusulkan oleh Inggris yakni Johnson's Line dan McDonald Line. Johnson's Line (sepanjang pegunungan Kunlun) dideklarasikan pada tahun 1865 dan sebagai dasar klaim India. Sementara McDonald Line (dari Hunza ke Xinjian melewati puncak Karakoram) di deklarasi pada tahun 1893 dan sebagai dasar klaim Tiongkok. Dasar klaim India atas Aksai Chin adalah sejarah administrasi pemerintahan Jammu dan Kashmir sejak tahun 1849. Garis perbatasan tersebut dikonfirmasi pada perjanjian India-Tibet tahun 1665, 1684 dan 1842. Sementara Tiongkok mengklaim Aksai Chin berdasar pada hubungan budaya antara Tibet dan Aksai Chin. Aksai Chin mempunyai kesamaan bahasa, agama dan budaya dengan Tibet (salah satu wilayah kedaulatan China) (Aarten, 1986, p. 2).

**Gambar 2.4** Sektor Barat



Sumber: <http://www.examsprint.com/article/s/india-china-border-disputes>

## **2.2. Dinamika Negosiasi China-India atas Kasus Sengketa Perbatasan Periode 1954 – 2004**

### **2.2.1. Panchsheel Agreement**

Pada 29 April 1954, Tiongkok dan India telah membuat 5 prinsip dasar hubungan bilateral yang disebut Panchsheel (5 prinsip damai). Kemudian prinsip ini diadopsi dan mendapat suara penuh pada 11 Desember 1957 oleh Majelis Umum PBB. Prinsip ini dibentuk untuk menanggapi aspirasi dari dunia internasional bahwa hubungan antar negara harus kooperatif dan berjalan damai. Panchsheel dideklarasikan pada pertemuan Perjanjian Dagang dan Hubungan Tibet (regional Tiongkok) dan India (*Agreement on Trade and Intercourse between the Tibet region of China and India*).

Gopal selaku penulis resmi biografi Nehru menyebut prinsip ini sebagai *zenith of world influence* (Arpi, 2015).

Lima prinsip dasar tersebut :

- i. Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty,*
- ii. Mutual non-aggression,*
- iii. Mutual non-interference,*
- iv. Equality and mutual benefit, and*
- v. Peaceful co-existence* (Panchsheel, 2004, p. 1).

Prinsip dasar ini menyatukan dari *Ten Principles of International Peace and Cooperation* yang dideklarasikan dalam Konferensi Asia Afrika ke 29 pada April 1955. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru menggagas sebuah Joint Statement pada 28 Juni 1954 yang dielaborasi dengan Panchsheel untuk membentuk sebuah *framework* bahwa prinsip ini tidak hanya digunakan antara dua negara namun untuk seluruh negara. Panchsheel juga dibentuk untuk membantu dunia internasional menghindari konsep tradisional seperti *balance of power* dan *competitive security*. Prinsip ini memberi pedoman bagi seluruh negara untuk berinteraksi dengan damai dan kooperatif sekaligus tetap menjaga identitas, semangat dan karakter bangsa (Nn, Panchsheel, 2004, pp. 2-4).

Satu tahun pasca penandatanganan perjanjian Panchsheel, pada 1 April 1955 Tiongkok dan India menandatangani Protokol di Lhasa. Protokol tersebut berisi kesediaan India untuk menyerahkan kontrol atas Tibet ke Tiongkok dan mengakuinya sebagai bagian dari kedaulatan negara tersebut. Jawaharlal Nehru mengganti hak-hak ekstrateritorial warisan imperial Inggris di Tibet dengan menarik pengawalan militernya dari Tibet serta menyerahkan layanan pos, telegraf dan telepon kepada

Tiongkok. Terbentuknya protokol juga menjadi awal mula terjadinya klaim Tiongkok di wilayah perbatasan. Tiongkok mengklaim wilayah India atas dasar keterkaitannya dengan Tibet seperti Arunachal Pradesh dengan budaya dan bahasa (Chellaney, *Why Tibet Remains the Core Issue in China-India Relations*, 2014).

Zhou Enlai dan Jawaharlal Nehru mengadakan pertemuan pada 19 April 1960 guna menanggapi aksi klaim yang terjadi sejak tahun 1955. Pertemuan ini penting guna menanggapi pelanggaran Tiongkok terhadap Perjanjian Panchsheel (Hyer, 2017). Pada 23 Januari 1959, Zhou Enlai mengumumkan klaimnya atas 40.000 mil persegi wilayah territorial India yakni Ladakh dan North East Frontier Agency (NEFA) atau Arunachal Pradesh. Selanjutnya 8 September 1959 China menolak secara tegas garis perbatasan McMahon Line dengan tidak ikut menandatangani Perjanjian Damai 1842 antara British India dan Inggris. China kemudian juga melakukan klaim 50.000 mil persegi atas Sikkim dan Bhutan (Maxwell, *Sino-Indian Border Dispute Reconsidered*, 1999, pp. 906-907).

### **2.2.2. Perjanjian antara Tiongkok dan Pakistan tentang Penyelesaian Sengketa Perbatasan**

Tiongkok dan Pakistan melakukan penandatanganan kesepakatan penyelesaian sengketa pada 3 Maret 1963. Kesepakatan terjadi pasca perang besar antara militer Tiongkok dan India di sepanjang garis perbatasan dari sektor timur ke barat pada tahun 1962. Kesepakatan ini bersifat timbal balik, Tiongkok memberikan lebih dari 100 mil tanah teritorialnya ke Pakistan dan sebaliknya Pakistan mengakui kedaulatan Tiongkok atas ratusan kilometer persegi tanah di utara Kashmir dan Ladakh. *Win-win solution*



menjadi tujuan kedua negara membentuk kesepakatan ini, Pakistan mendapatkan area yang luas tanpa konflik dan Tiongkok memperkuat posisinya di area perbatasan dengan India. Pakistan menyerahkan kontrol atas sengketa perbatasan Kashmir dengan India kepada Tiongkok (Afridi & Khan, 2016, pp. 2-3).

### **2.2.3 Revitalisasi Hubungan Bilateral Pasca 15 tahun Kekosongan Diplomatik (1960-1975)**

Pertemuan Zhou Enlai dan Jawaharlal Nehru pada tahun 1960 menjadi hubungan diplomatik terakhir sebelum perang 1962 terjadi. Situasi tidak terkendali pasca penolakan Tiongkok terhadap tawaran India untuk membahas masalah klaimnya atas Bhutan dan Sikkim tahun 1961. Peperangan besar terjadi pada tahun 1962, tentara Tiongkok masuk ke wilayah Sikkim Utara dan NEFA lagi dan kemarahan Tiongkok atas bergabungnya Sikkim ke Indian Union (Nn, 1975). Sikkim melakukan referendum dan hasil pemungutan suara menyatakan keputusan untuk bergabung dengan India. Namun Tiongkok menuduh keputusan tersebut atas dasar paksaan India dengan menyandra Chogyal (pemimpin) mereka yakni Palden Thondup Namgyal (Ray, 1984, pp. 2-7).

Pada April 1976, Tiongkok dan India memutuskan untuk merevitalisasi hubungan diplomatik yang sempat kosong selama 15 tahun. Sebagai tanda bukti kedua negara secara simbolis mengirimkan duta besar untuk datang ke masing-masing negara. K. R Narayanan sebagai duta besar perwakilan dari India ke Tiongkok dan Chen Chao Yuan sebagai duta besar perwakilan Tiongkok ke India. Keputusan ini dipertergas dengan kunjungan Menteri Luar Negeri India Atal Bihari Vajpaye ke

Tiongkok pada Februari 1979, pertama kalinya setelah kunjungan Zhou Enlai ke India pada tahun 1960. Selama kunjungan, kedua negara aktif membahas tentang permasalahan perbatasan termasuk pengajuan gagasan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Huang Hua. Gagasan tersebut berisi tiga formula yakni: (Singh Z. D., *The Himalayan Stalemate Retracing the India-China Dispute*, 2011, pp. 12-14)

1. Menyadari pentingnya penyelesaian lebih dini pada masalah perbatasan oleh kedua belah pihak
2. Memastikan terwujudnya perdamaian dan ketenangan di daerah perbatasan selama proses negosiasi berlangsung
3. Menghindari hal yang akan menjadi hambatan dalam pengembangan hubungan bilateral di berbagai bidang

#### **2.2.4 Perjanjian Pembentukan Joint Working Group untuk membahas Masalah Perbatasan**

India menerapkan diplomasi aktif dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan dengan pembentukan perjanjian maupun kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Pada 23 Desember 1988, Perdana Menteri Rajiv Ghandi beserta para menterinya melakukan kunjungan guna penandatanganan perjanjian dan pembentukan *Joint Working Group*. Terdapat dua perjanjian yang ditandatangani oleh kedua negara yakni Perjanjian Pengelolaan Transportasi Sipil Udara dan Perjanjian Kerjasama Budaya (Nn, 2014, pp. 53-55).

*Joint Working Group* dibentuk untuk menciptakan kondisi damai selama proses pencarian solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Agenda ini menjadi

perbaikan dari perjanjian Panchsheel untuk menghindari kesalahan hingga mengakibatkan perang tahun 1962. Perjanjian Panchsheel menetapkan prinsip dasar tanpa adanya proses penyelesaian sengketa yang kooperatif dan berasas kerjasama sehingga mengakibatkan perbedaan cara pandang. Sebagai bukti, pada tahun 1986 kedua negara mengumumkan garis perbatasan dengan versi yang berbeda atas McMahon Line dan wilayah Arunachal Pradesh (Nn, 1989, pp. 199-200).

*Joint Working Group (JWG)* diadakan 15 pertemuan mulai dari tahun 1989-2005 dengan tuan rumah Beijing dan New Delhi dengan beberapa fase pembahasan dan perkembangan proses negosiasi sebagai berikut : (Deepak, 2005, pp. 303-325)

**Tabel 2.1** Joint Working Group

No	Joint Working Group (JWG)	Pembahasan
1	1-4 Juli 1989 di Beijing	Optimalisasi kerja ahli militer dalam menjaga perdamaian dan ketenangan selama proses negosiasi di sepanjang garis LAC
2	31 Agustus-1 September 1990 di New Delhi	Perumusan pertemuan regular antar personil militer sebagai upaya pertukaran informasi dan transparansi kegiatan militer di pos perbatasan
3	13 Mei 1991 di Beijing	Tidak ada pembahasan spesifik namun penegasan kembali kestabilan area selama proses negosiasi berlangsung
4	20-21 Februari 1992 di New Delhi	Evaluasi dan pembahasan tiga ronde JWG sebelumnya. Kesepakatan pembentukan pertemuan personil militer dan menteri pertahanan yang diadakan dua kali dalam setahun (Juni & Oktober). Bertempat di Bum La (Sektor Timur) & Spanggur Gap (Sektor Barat). Pengusulan jaringan telepon langsung antara komandan militer.
5	27-29 Oktober 1992 di Beijing	Evaluasi empat ronde JWG sebelumnya serta bertukar pandangan tentang masalah perbatasan

6	25-30 Juni 1993 di New Delhi	Penekanan transparansi terhadap pos terdepan penjagaan perbatasan sepanjang LAC. Pencegahan gangguan udara berupa pesawat tempur (radius – 10 km) dan penarikan pasukan militer
7	6-7 Juli 1994 di Beijing	Ratifikasi perjanjian Perdamaian dan Ketenangan tahun 1993. Klarifikasi atas perbedaan pandangan tentang aturan di sepanjang LAC yang menjadi penyebab kontak senjata antara <i>People's Liberation Army (PLA)</i> dan <i>Indian Army</i>
8	18-20 Agustus 1995 di New Delhi	Kedua negara sepakat untuk menarik kembali pasukan militer di empat pos terdepan sejauh 50-100 meter dari LAC
9	16-18 Oktober 1996 di Beijing	Peningkatan kunjungan antar jenderal militer dan pembangunan pos penjagaan bersama di sekitar LAC khususnya sektor timur
10	4-5 Agustus 1997 di New Delhi	Ratifikasi perjanjian tentang CBMs 1996. Klarifikasi LAC untuk menentukan definisi garis perbatasan secara bersama. Penekanan pada implementasi CBMs 1993 dan 1996 pada JWG.
11	26-27 April 1999 di Beijing	Revitalisasi hubungan bilateral kedua negara yang renggang akibat aktifitas uji coba nuklir India di kawasan perbatasan (Sektor Barat). Pelanggaran terhadap perjanjian Panchsheel dan perjanjian tentang Perdamaian & Ketenangan tahun 1993
12	28-29 April 2000 di New Delhi	Penerapan pendekatan “Forward Looking” dan membentuk kelompok ahli dalam sengketa perbatasan. Lanjutan pembahasan klarifikasi LAC dan implementasi CBMs dalam JWG
13	31 Juli – 1 Agustus 2000 di New Delhi	Penerapan pendekatan Konstruktif dan penekanan pendekatan “Forward Looking” dalam usaha penyelesaian sengketa perbatasan. Bertukar pandangan tentang masalah yang terjadi di regional dan internasional

14	21-22 November 2002 di New Delhi	Penekanan kembali pendekatan “Forward Looking” dan tukar pendapat tentang peta wilayah di sektor barat
15	30-31 Maret 2005	Pembahasan dan evaluasi menyeluruh tahapan JWG 1-14. Evaluasi hubungan bilateral politik, keamanan maupun ekonomi selama proses negosiasi. Kalrifikasi LAC dan Implementasi CBMs dalam proses JWG

### **2.2.5 Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control**

Kesepakatan terjalin pasca kunjungan kenegaraan Tiongkok yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Peng ke India. Kunjungan ini menjadi momentum setelah 31 tahun hubungan bilateral kedua negara renggang sejak tahun 1960. India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narasimha Rao membawa kebijakan baru yang diusulkan ke Tiongkok mengenai definisi garis perbatasan. Rao merubah resolusi sengketa perbatasan dengan menambah garis militer dan kembali ke pendekatan sektoral bukan secara keseluruhan. Namun Tiongkok menolak usulan tersebut dan tetap menerapkan pendekatan secara keseluruhan atau *Line of Actual Control (LAC)* (Sawhney & Wahab, 2017, pp. 2-10).

Pada September 1993 Rao dan Li Peng juga menandatangani *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control (LAC) China-India. Confidence Building Measures (CBMs)* menjadi dasar dari dibentuknya perjanjian ini sebagai langkah untuk mengurangi ketidakpercayaan selama proses negosiasi. Selain itu juga dilakukan sumpah bersama menentang penggunaan kekuatan militer di kawasan, penyelesaian konflik dengan konsultasi dan kooperatif serta

pengurangan jumlah militer di kawasan Tibet oleh kedua negara. Tiongkok dan India juga sepakat untuk tetap mempertahankan militer di sepanjang LAC dengan prinsip kemanan timbal balik dan setara (Tripathi, 2012, pp. 1-5).

### **2.2.6 Agreement on Confidence Building Measures in Military Fields along the LAC in the India-China Border Area**

Pada November 1996 diadakan perjanjian yang menjadi penekanan dari perjanjian tahun 1993 tentang *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility* di kawasan perbatasan namun lebih fokus ke bidang militer. Terdapat tiga poin utama yang dibahas untuk implementasi CBMs. Pertama, membentuk *Military and Diplomatic Experts Group* dalam *Joint Working Group* (JWG) sebagai langkah awal CBMs. Kedua, menginisiasi pertemuan wajib yang diadakan 2 kali dalam setahun (Juni dan Oktober) di setiap sektor. Sektor Timur di Bum La dan Dichu, Sektor Tengah di Lipulekh dekat Pithograph dan Sektor Barat di Spanggur Gap. Ketiga, *Joint Working Group* menjadi fasilitas untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan kesalahpahaman, perbedaan persepsi bahkan perselisihan selama proses negosiasi (Sidhu & Yuan, 1999, p. 16).

Perjanjian 1993 dan 1996 membawa dampak positif kepada perkembangan CBMs dengan beberapa hasil signifikan di garis perbatasan. Pada tahun 1993 kedua negara sepakat untuk memastikan transparansi pada setiap kegiatan militer di garis perbatasan termasuk pencegahan gangguan udara dan pemindahan pasukan secara illegal. Kemudian pada Agustus 1995 dibentuk perjanjian untuk menarik kembali pasukan militer dari pos terdepan sejauh 50-100 meter dari garis perbatasan. Pada

Oktober 1996 dilakukan kesepakatan untuk meningkatkan kunjungan timbal balik oleh petinggi militer berpangkat jenderal besar dan pembangunan pos pengawalan di sepanjang garis perbatasan yang disengketakan. Pertemuan pada Agustus 1997 diadakan sebagai konsekuensi kedua belah pihak atas kesepakatan yang telah dibuat. Pertemuan sebagai instrument untuk meratifikasi hasil dari pertukaran perwakilan kedua negara dalam implementasi CBMs dalam *Joint Working Group* (Sidhu & Yuan, 2001, pp. 354-356).

### **2.2.7 Pertemuan China dan India pasca Perjanjian 1993 dan 1996**

Hubungan bilateral antara kedua negara tidak mengalami kenaikan bahkan beberapa sektor mengalami penurunan pasca perjanjian 1993 dan 1996. Pertemuan ini juga menjadi penekanan terhadap keputusan Tiongkok dan India membuka kembali jalur Ladakh, Kailash dan Mansarover yang ditutup pasca konflik. Selain itu membahas tentang tindak lanjut Dalai Lama atas pemisahannya dari tanah India sebagai konsekuensi penandatanganan lima prinsip dasar Perjanjian Panchsheel. Pada 14 Mei 1998, Tiongkok mengecam keras tindakan uji coba nuklir India yang dilakukan di sektor barat wilayah perbatasan. India melakukan penelitian dan aksi uji coba nuklir bersama dengan Pakistan. Tiongkok memaksa India-Pakistan untuk menandatangani Perjanjian Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (Sidhu & Yuan, 2001, p. 356). NPT merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai (UNODA, 1995).

### **2.2.8 Agreement on Adopting the "Forward Looking" Approach and forming an Expert Group at the JWG to Resolve Border Disputes and Clarification of LACs and Inter-Military CBMs**

*Joint Working Group* (JWG) dibentuk guna memberikan wadah bagi militer kedua negara untuk berinteraksi dan menghasilkan solusi penyelesaian sengketa perbatasan. JWG mempunyai peran dalam pembentukan perjanjian CBM tahun 1993 dan 1996 (Sidhu & Yuan, 2003, pp. 122-3). Pendekatan *forward looking* digunakan pada JWG ke 13 tahun 2000 agar diskusi tidak terpaku dengan masalah yang lalu dan efektif untuk membahas masa depan. Perubahan arah diplomasi dari *representative meetings* ke arah yang lebih tinggi dan kompleks yakni *high level meetings*. India mengusulkan untuk mengadakan *Border Personal Meeting* (BPM) untuk meningkatkan pertukaran informasi dan transparansi bidang militer sebagai langkah dari implementasi CBMs. Usulan tersebut diajukan pada Dialog Bidang Pertahanan Tahunan tahun 2011 (Chansoria, India and China: Assessing the Need to Strengthen Bilateral Confidence Building Measures, 2012, pp. 18-19).

Tiongkok dan India mengulas CBMs untuk dibawa ke JWG sebagai bahan evaluasi. Sebagai salah satu pencapaian dalam proses normalisasi hubungan diplomatik Tiongkok-India maka CBMs mempunyai tiga prinsip utama yakni *declarative principles*, *informative exchange principles* dan *constraining confidence building measures principles* (Das R. N., 2013, pp. 46-47).

Secara rinci *declarative principles* terbagi menjadi empat poin utama. Tiongkok maupun India tidak boleh ada ancaman menggunakan kekuatan satu sama lain. Kedua belah pihak harus hormat dan mematuhi *Line of Actual Control* (LAC).



Penyelesaian mengenai sengketa perbatasan harus secara adil, wajar dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Serta harus meminimalisir pasukan militer kedua negara di kawasan perbatasan.

Sementara *informative exchange principles* terbagi menjadi tiga poin. Tiongkok ataupun India harus menyiapkan ahli militer diplomatik untuk mengadakan pertemuan reguler. Menetapkan jalur batas dan meningkatkan pertemuan antara komandan pasukan perbatasan. Serta pertukaran informasi tentang bencana alam dan penyakit di sepanjang perbatasan.

Selanjutnya *constraining confidence building measures* terbagi menjadi empat poin. Tiongkok dan India harus membatasi jumlah pasukan militer dalam zona yang sudah disepakati dalam LAC termasuk jumlah tank tempur dan kendaraan tempur infantri dengan senjata 75mm atau lebih besar, mortar dengan caliber setidaknya 120mm serta rudal ke permukaan udara (masih tahap negosiasi). Menghindari latihan militer skala besar yang melibatkan satu divisi (15.000 pasukan) dan memberi pihak lain jika melakukan latihan dengan satu brigade (5.000 pasukan). Melarang penerbangan pesawat tempur dalam jarak 10 km dari LAC, namun pesawat tanpa senjata dan helikopter diperbolehkan dan dilarang menembaki atau memburu dalam radius 2 km dari LAC.

### **2.2.9 Agreement and Declaration of the Principles of Comprehensive Relations and Cooperation between India and China.**

Pasca momentum serangan teroris 11 September di Amerika, India dan Tiongkok komitmen untuk membangun hubungan yang lebih intens. Gelombang

terorisme juga terjadi di India yang dilakukan oleh kelompok militan India dan kelompok sparatis berbasis agama. Pemberontakan oleh kelompok sparatis ini terjadi di wilayah timur hingga selatan perbatasan dengan Pakistan. Pada Januari 2002, Perdana Menteri China Zhu Rongji's mengunjungi India dengan interaksi politik yang signifikan. Kerjasama *counter terrorism* dengan pertukaran badan intelegensi dan bantuan pasukan militer di wilayah Selatan dan Jammu-Kashmir (Keshav, 2004, p. 207). Selain melakukan kerjasama bidang keamanan, kunjungan Zhu Rongji's juga menghasilkan enam perjanjian dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Pada tahun 2003 menteri Pertahanan India George Fernandes mengunjungi Tiongkok dengan pembahasan tentang krisis penyakit SARS, pertukaran militer, dialog *counter terrorism*, dan peningkatan CBMs sepanjang LAC (Pokharna, 2009, pp. 97-98).

Pada Juni 2003, Perdana Menteri A.B Vajpayee mengunjungi Tiongkok guna penandatanganan sepuluh perjanjian dan deklarasi *Agreement and Declaration of the Principles of Comprehensive Relations and Cooperation between India and China*. Kedua negara menginisiasi sebuah langkah baru negosiasi dengan tema *Special Representative Meeting (SRM)* dan pembentukan kelompok ahli *Joint Study Group (JSG)*. Selain itu dalam kasus Tibet, India mengakui bahwa wilayah otonomi Tibet termasuk dalam kedaulatan Tiongkok dan sekaligus melarang gerakan anti Tiongkok oleh orang Tibet di India. Sebaliknya Tiongkok juga mengakui wilayah Sikkim sebagai kedaulatan dari India (Pokharna, 2009, pp. 99-100).

### **Periode 2005-2017**

Pertemuan Special Representative Meeting (SRM) diadakan 19 putaran hingga tahun 2016 (pra Docklam Standoff 2017) (Kondapalli, 2007, pp. 415-417)

**Tabel 2.2** *Special Representative Meeting (SRM)*

No	Special Representative Meeting (SRM)	Pembahasan
1	23-24 Oktober 2003 di New Delhi	Brajesh Mira (India) dan Dai Bingguo (Tiongkok) dengan tema pembahasan “ramah, konstruktif dan kooperatif”
2	12-13 Januari 2004 di Beijing	Implementasi dan optimalisasi CBMs ke LAC, pertukaran militer serta kerjasama bidang keamanan & ekonomi
3	26-27 Juli 2004 di New Delhi	J.N Dixit (India) menggantikan Brajesh Mira dalam SRM. Pembahasan masih fokus pada implementasi CBMs, pertukaran militer dan kerjasama ekonomi, keamanan & ekonomi
4	18-19 November 2004 di Beijing	Perwakilan kedua negara melakukan evaluasi terhadap pertemuan SRM ketiga karena kurangnya optimalisasi implementasi CBMs
5	10-12 Maret 2005	Pembentukan <i>China-India Regional Trading Arrangement</i>
6	26-27 September 2005 di Beijing	Diadakan 10 hari setelah pertemuan PM India dan President Tiongkok di Sidang Umum PBB. Membentuk <i>Sino-Indian Strategic Cooperative Partnership Oriented to Peace and Prosperity in 2005</i> . Mendeklarasikan tahun 2006 sebagai <i>Sino-Indian friendship Year</i>
7	11-13 Maret 2006 di New Delhi dan Kumarkom	Pertemuan mengambil konsep pendekatan “HouseBoat Diplomacy”. Kedua perwakilan memutuskan pembentukan <i>basic framework</i> untuk pertemuan agar membuahkan hasil.
8	25-26 Juni 2006 di Beijing	Penggabungan <i>basic framework</i> yang diusulkan oleh kedua negara untuk menjadi pedoman pada pertemuan selanjutnya. Pembukaan kembali wilayah dagang perbatasan Nathu La Pass
9	16-18 Juni 2007 di Beijing	Pembahasan masih berlanjut pada penentuan <i>basic framework</i> dengan berdasar pada perjanjian 2005 tentang Parameter Politik dan Prinsip-Prinsip Panduan. Tiongkok lebih condong ke perdagangan namun India lebih fokus ke masalah sengketa perbatasan

10	20-22 April 2007 di New Delhi	Masih dalam ranah penepatan <i>basic framework</i> dengan lebih mengacu pada Parameter Politik dan Prinsip-Prinsip Panduan
11	26-27 September 2007 di Beijing	Perbedaan usulan pendekatan penyelesaian sengketa perbatasan, Tiongkok menuntut <i>mutual understanding and mutual accommodation</i> , India mengusulkan <i>fair, reasonable and mutually acceptable</i> .
12	18-19 September 2008 di Beijing	Pembahasan masih terpaku pada penetapan <i>basic framework</i>
13	8-9 Agustus 2009 di New Delhi	Kesepakatan tentang penentuan <i>basic framework</i> berdasar Parameter Politik dan Prinsip-Prinsip Panduan dengan pendekatan <i>fair and reasonable solution acceptable</i> . Penekanan kembali <i>China India Strategic Cooperative Partnership</i> . Menetapkan isu ekonomi menjadi pemabahasan utama kedua setelah masalah perbatasan.
14	29-30 November 2010 di Beijing	Kesepakatan tentang perluasan pembahasan tidak hanya perbatasan dan ekonomi namun budaya, infrastruktur dll.
15	15-17 Januari 2012 di New Delhi	Penandatanganan <i>Agreement on the establishment of a Working Mechanism on Consultation an Coordination on India-China Border Affairs</i> .
16	28-29 Juni 2013 di Beijing	Tukar pendapat tentang implementasi consensus yang telah sukses dilaksanakan oleh kedua pemimpin negara. Penyelenggaraan <i>working mechanism for consultation and coordination on China-India Border Affairs</i> . Penanganan konflik jarak dekat antar militer di South Tian Wendian Valley.
17	10-11 Februari 2014 di New Delhi	Evaluasi terhadap kunjungan pimpinan kedua negara pada tahun 2013 yang menghasilkan beberapa perjanjian. Melanjutkan pembahasan mengenai <i>basic framework</i> untuk penyelesaian sengketa perbatasan.
18	23 Maret 2015 di New Delhi	Menekankan pentingnya pertemuan antar pemimpin negara. Konsultasi masalah <i>counter</i>

		<i>terrorism</i> , maritim, perubahan iklim dan kerjasama pengembangan nuklir.
19	20 April 2016 di Beijing	Membahas tentang posisi Tiongkok sebagai anggota dewan keamanan tetap PBB untuk teguh dalam pendirian tentang “Ancaman terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional yang disebabkan oleh Aksi Teroris”

#### **2.2.10 Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question**

Pasca kunjungan Perdana Menteri Vajpayee ke Beijing pada tahun 2003, perkembangan proses penyelesaian sengketa perbatasan meningkat signifikan. SRM empat kali diadakan dalam jangka dua tahun dengan satu penandatanganan perjanjian prinsip-prinsip hubungan dan kerjasama komprehensif. Pada 30-31 Maret 2005 di Beijing diadakan ronde terakhir JWG dengan pembahasan evaluasi seluruh proses JWG 1-14. Fokus pembahasan utama JWG masih dalam klarifikasi LAC dan implementasi CBMs (India M. C., 2014).

Pada tanggal 11 April 2005, Tiongkok dan India menandatangani perjanjian Parameter Politik dan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Penyelesaian Sengketa Batas China-India. Seperti yang tertulis di pasal 2 bahwa perjanjian ini tetap berdasar pada lima prinsip dasar Panchsheel 1954 dan sebagai momentum perubahan arah diplomasi yang lebih representative bagi kedua belah pihak. Selain itu penandatanganan ini menjadi penekanan dari perjanjian sebelumnya yakni Perjanjian 1993, 1996 dan 2003 sesuai yang tertulis pada pasal IX (India M. G., 2005).

### **2.2.11 Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of India and the Ministry of National Defence of the People's Republic of China for Exchanges and Cooperation in the Field of Defence 2006**

MoU ini dilakukan berdasar pada *Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation between India and China* tahun 2003 dan *Joint Statement* tahun 2005 serta prinsip PBB tentang pengembangan kerjasama strategi dan kooperatif. Selain itu hal ini sebagai wujud implementasi CBMs tahun 1993 dan 1996 termasuk untuk angkatan bersenjata agar terbentuk rasa saling percaya di sepanjang garis perbatasan. Secara keseluruhan fokus pada bidang militer dengan beberapa perumusan dan pengusulan kerjasama. Tertulis di pasal 1 bahwa perlu ada pertemuan pejabat tinggi militer kedua negara yang intens serta dialog pertahanan tahunan. Hal ini guna mengevaluasi proses pertukaran militer baik akademi maupun profesional dan latihan gabungan *search & rescue*, anti pembajakan dan *counter terrorism* (India M. C., 2006).

### **2.2.12 Point Strategy in A Joint Declaration on Further Developing the Strategic and Cooperative Partnership between China and India**

1. Ensuring comprehensive development of bilateral relations
2. Strengthening institutional linkages and dialogue mechanisms
3. Consolidating commercial and economic exchanges
4. Expanding all-round mutually beneficial cooperation
5. Instilling mutual trust and confidence through defence cooperation
6. Seeking early settlement of outstanding issues
7. Promoting trans-border connectivity and cooperation
8. Boosting cooperation in science and technology
9. Revitalizing cultural ties and nurturing people-to-people exchanges
10. Expanding cooperation on regional and international stages (China, 2006)

### **2.2.13 The Shared Vision of India and China for the 21<sup>st</sup> Century 2008**

Momentum ini terjadi ketika kunjungan Perdana Menteri India Manmohan Singh atas undangan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao pada Januari 2008. Pertemuan ini menjadi batu loncatan kedua negara untuk merumuskan kesepakatan jangka panjang pedoman penyelesaian sengketa perbatasan. *A Shared Vision for the 21<sup>st</sup> Century* merupakan hasil dari pengembangan *Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity* (Scott, 2008, pp. 244-5).

Perjanjian ini dibentuk dengan 18 kesepakatan dalam berbagai bidang mulai dari ekonomi, politik dan keamanan. Lima prinsip dasar Panchsheel tetap menjadi pedoman dalam setiap proses negosiasi penyelesaian sengketa perbatasan. Tiongkok dan India sebagai negara besar dan tempat tinggal sepertiga umat di bumi sadar bahwa hubungan bilateral antara keduanya mempunyai dampak yang signifikan bagi regional dan internasional. Oleh karena itu keduanya sepakat untuk mendorong hubungan multilateral di berbagai forum seperti East Asia Summit, Asia Europe Meeting, South Asian Association for Regional Cooperation. Selain itu juga penekanan pada penyelesaian masalah terorisme dan penggunaan nuklir (India M. o., 2008).

### **2.2.14 Joint Communique of the Republic of India and the People's Republic of China 2010**

Kerjasama ini merupakan refleksi dari kesepakatan sebelumnya tentang CBMs 1993 dan 1996 dan Panchsheel 1954. Kedua negara membentuk mekanisme pertemuan regular antara kepala pemerintahan dan menteri luar negeri. Selain itu juga merumuskan telepon hotline antara Perdana Menteri India dan Perdana Menteri

Tiongkok (India M. C., 2010). China dan India juga sepakat untuk menjadikan tahun 2011 sebagai *Year of India China Exchange*. Kedua negara mendorong momentum ini dengan pertukaran secara masif diberbagai bidang seperti organisasi masyarakat sipil, pemuda, media, beasiswa, *think-tanks* dan budaya (Pandit, Krishnamurty, Panda, & R.N.Das, 2011, p. 3).

**2.2.15 Agreement on the Establishment of a Working Mechanism on Consultation a Coordination on India-China Border Affairs 2012**

Kesepakatan ini dibentuk berdasarkan hasil dari *Special Representative Meetings* (SRM) ke 15 sebagai langkah aktif kedua negara untuk terus melakukan peningkatan kepercayaan selama proses negosiasi berlangsung (Nn, 2016). *Working Mechanism on Consultation a Coordination on India-China Border Affairs* dibentuk pada 17 Januari 2012 dan akan dipimpin oleh *Joint Secretary level* dari Menteri Luar Negeri India dan *Director General level* dari Menteri Luar Negeri Tiongkok serta dari diplomat dan militer. Namun *working mechanism* ini tidak membahas tentang penyelesaian sengketa perbatasan atau mempengaruhi kinerja *Special Representatives Meeting Mechanism* (India M. C., 2012).

Perkembangan *Working Mechanism on Consultation a Coordination* (WMCC) *on India-China Border Affairs*: (Panda, 2014, p. 6)

**Tabel 2.3** *WMCC on India-China Border Affairs*

No	Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs	Pembahasan
1	5-6 Maret 2012 di Beijing	- Peraturan mekanisme kerja.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi darurat dilakukan melalui konferensi telepon dan video.</li> <li>- Penambahan rute untuk perdagangan di perbatasan.</li> <li>- Eksplorasi rute alternative Kailash Mansarovar Yatra</li> </ul>
2	29-30 November 2012 di New Delhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan tentang perkembangan di daerah perbatasan</li> <li>- Pembentukan langkah-langkah tambahan untuk menjaga perdamaian dan ketenangan</li> <li>- Pembukaan area pasar bebas di Nathu La</li> <li>- Rute tambahan untuk Kailash Mansarovar Yatra</li> </ul>
3	23-24 Juli 2013 di New Delhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan fungsi <i>Working Mechanism</i></li> <li>- Penambahan poin pada <i>Confidence Building Measures (CBMs)</i></li> </ul>
4	29-30 September 2013 di Beijing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi perkembangan di kawasan perbatasan khususnya Sektor Barat</li> </ul>
5	10 Februari 2014 di New Delhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi <i>Border Defence Cooperation Agreement (BDCA)</i></li> <li>- Penambahan CBMs</li> </ul>
6	28-30 April 2014 di Beijing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi BDCA</li> <li>- Implementasi CBMs</li> <li>- Menetapkan rute alternative untuk Kailash Mansarovar Yatra</li> </ul>
7	27 Agustus 2014 di Beijing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasionalisasi BDCA</li> </ul>
8	16-17 Oktober 2014 di New Delhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian konsensus pada implementasi CBMs seperti interkasi reguler antara markas besar Angkatan Darat dan Komando Lapangan kedua negara.</li> </ul>
9	30-31 Agustus 2016 di New Delhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi atas WMCC ke VIII dengan penekanan terhadap komunikasi jalur hotline oleh militer kedua negara di jalur perbatasan</li> </ul>
10	17 November 2017 di Beijing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi terhadap implementasi CBMs di semua sektor tidak hanya sektor barat saja.</li> </ul>

### **2.2.16 A Vision for Future Development of China-India Strategic and Cooperative Partnership 2013**

Kerjasama dibentuk dengan menerapkan konsep *Strategic and Cooperative Partnership fro Peace and Prosperity* yang berdasar pada lima prinsip dasar Panchsheel 1954 dan CBMs 1993 & 1996. Kedua negara sepakat untuk mendorong kinerja *Strategic Economic Dialogue (SED)* dan *Joint Economic Group (JEG)* sebagai modal untuk masuk ke *Regional Trade Agreement (RTA)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Dalam ranah sengketa perbatasan, kedua negara sepakat untuk membentuk *Border Defence Cooperation Agreement (BDCA)* sebagai refleksi perjanjian tahun 1993, 1996 dan 2005. Selain itu juga dilakukan penandatanganan *MoU Strengthening Cooperation on Transborder Rivers* yang diperantarai oleh *Expert Level Mechanism (Office P. I., 2013)*.

### **2.2.17 Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on Border Defense Cooperation Agreement (BDCA)**

Perjanjian ini ditandatangani pada 23 Oktober 2013 di Beijing oleh Perdana Menteri India Dr Manmohan Singh dan Premier China Li Keqiang. Tujuan utama dari perjanjian ini untuk memberikan definisi dari *Line of Actual Control (LAC)*. BDCA merupakan salah satu langkah penting dalam peningkatan CBMs karena menyangkut langsung dengan kebijakan di area perbatasan (Das B. , 2014, pp. 35-36).

Perjanjian 1993, 1996 dan 2005 merupakan dasar dari implementasi CBMs untuk LAC menjadi pondasi atas terbentuknya perjanjian ini. Pada artikel II disebutkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan.

1. Exchange information-including information about military exercises, aircrafts, demolition operations and unmarked mines-and take consequent measures conducive to the maintenance of peace, stability and tranquility along the line of actual control in the India-China border areas,
2. Jointly combat smuggling of arms, wildlife, wildlife articles and other contrabands,
3. Assist the other side in locating personnel, livestock, means of transport and aerial vehicles that may have crossed or are possibly in the process of crossing the line of actual control in the India-China border areas,
4. Work with the other side in combating natural disasters or infectious diseases that may affect or spread to the other side,
5. Any other way mutually agreed upon by the two sides (Office P. I., 2013).

Pada pasal III dijelaskan tentang pertemuan berkala di sepanjang garis perbatasan yang dilaksanakan oleh militer India dan Tiongkok. Selain itu juga pertemuan secara periodikal oleh menteri pertahanan kedua negara. Sebagai pendorong implementasi dari perjanjian ini maka dibentuk *Border Personnel Meeting* (BPM) di semua sektor (barat, tengah, timur) (Office P. I., 2013).

#### **2.2.18 China-India Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity 2014**

Bidang ekonomi menjadi isu pembahasan utama diluar isu perbatasan, social, budaya dan politik. Evaluasi *Joint Economic Group* hingga penandatanganan perjanjian *Five Year Development Program for Economic and trade Cooperation*. Selain itu juga penekanan terhadap kerangka kerja BCIM (Bangladesh, China, India, Myanmar) *Economic Corridor*. India juga membuka investasi bidang infrastruktur dan industri hingga 20 miliar dollar amerika. Sebagai implementasi dari investasi Tiongkok ke India maka disepakati dan dilakukan penandatanganan *MoU Plan on Cooperation*

*in Railways*. Menjaga komitmen dalam pengembangan kerjasama maka ditetapkan 2015 sebagai *Visit India Year* dan 2016 sebagai *Visit China Year*. Selain itu penetapan Nathu La Pass tidak hanya sebagai jalur perdagangan namun jalur alternative peziarah agama Kailash Manasarovar Yatra ke wilayah Tibet (India M. C., 2014).

**BAB III**  
**FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PENYELESAIAN SENGKETA**  
**PERBATASAN TIONGKOK-INDIA**

Pada bab ini memaparkan tentang faktor utama ataupun isu lain yang menghambat proses penyelesaian sengketa perbatasan China-India. Terdapat empat variabel teori *Issue Linkage* yang digunakan yakni *Material Linkages*, *Bargaining Linkages*, *Organisational and Procedural Linkages* dan *Political Linkages*. Sub-bab pertama akan membahas tentang *material linkages* yang menjadi faktor utama dan mendasar penghambat proses negosiasi sehingga kasus ini belum terselesaikan. Terdapat dua aspek yang menjadi fokus pada variabel *material linkages* yakni pengaruh *state prestige* dan kurangnya implementasi *confidence building measures* (CBMs). *State prestige* menjadi kendala utama karena negara akan lebih berorientasi pada kepentingan nasional daripada resolusi sengketa perbatasan. Sedangkan CBMs yang telah dibentuk dalam beberapa perjanjian (1993, 1996, 2005) tidak berjalan optimal. Hal ini mengakibatkan langkah negosiasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai panduan. Selain itu ketidakefektifan CBMs berimbas pada biasanya definisi *Line of Actual Control* (LAC) yang seharusnya menjadi garis resmi perbatasan China-India. Definisi LAC yang masih bias mengakibatkan konflik senjata jarak dekat di sekitar kawasan perbatasan yang memperkeruh hubungan bilateral selama proses negosiasi.

Dalam analisis *issue linkage* penting untuk mengklasifikasikan setiap peran yang terlibat dengan membagi menjadi dua bagian yakni pihak *linker* dan pihak *linkee*.

Pihak Tiongkok berperan sebagai *linker* karena mempunyai kendali lebih atas perjanjian yang terjadi dalam *issue linkage*. *Linker* akan memberikan tawaran untuk memunculkan keterkaitan dengan isu lainnya diluar isu utama. Sementara pihak India sebagai *linkee* mempunyai peran sebagai penentu dalam hubungan dengan menerima tawaran tersebut atau tidak. Kedua aspek tersebut ditentukan dari kapasitas dan kekuatan yang lebih besar antara kedua belah pihak yang kemudian mempunyai kendali atas berjalannya proses negosiasi dalam konsep *issue linkage* ini (Haas, 1980, pp. 360-367).

Pada sub-bab kedua lebih mengarah kepada isu lain yang mempunyai pengaruh terhadap kasus ini dan menghambat proses negosiasi. Terdapat dua isu *political linkages* dan satu *organisational and procedural linkages* yang mempunyai pengaruh terhadap kasus sengketa perbatasan Tiongkok-India. Pertama, pengaruh Tibet sebagai negara bufferzone dalam sengketa kedua negara dan mempunyai hubungan sejarah, geografi bahkan religi. Posisi Tibet yang secara kedaulatan dibawah Tiongkok dan diakui oleh India menjadi pemicu awal aksi klaim Tiongkok terhadap wilayah India. Aksi klaim Tiongkok atas wilayah India (Aksai Chin & Arunachal Pradesh) berdasar pada keterkaitan budaya, bahasa dan agama dengan Tibet yang merupakan bagian dari kedaulatan Tiongkok.

Kedua, Pakistan juga mempunyai pengaruh kuat terhadap kasus sengketa perbatasan Tiongkok-India secara politik maupun keamanan. Tiongkok dan Pakistan melakukan perjanjian atas barter wilayah di Kashmir. Tiongkok diberikan sebagian wilayah Kashmir oleh India kemudian membantu konflik perbatasan dengan India.

Pakistan juga mempunyai peran atas berkembangnya penelitian dan uji coba nuklir di India. Pada tahun 1998 pertemuan tahunan Tiongkok-India dibatalkan akibat uji coba nuklir India-Pakistan di wilayah perbatasan (sektor barat). Uji coba nuklir ini kemudian merusak hubungan bilateral dan proses negosiasi yang sedang berlangsung. Tiongkok menganggap India telah melanggar lima prinsip Panchsheel tentang menjaga perdamaian dan ketenangan selama proses negosiasi. Selain itu juga menurunkan rasa percaya satu sama lain yang sedang dibangun dengan pendekatan “*Forward Looking*” *Confidence Building Measures* (CBMs).

Ketiga, keberadaan South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) akan menjadi institusi yang menghambat atau justru memberi dukungan untuk resolusi sengketa perbatasan.

### **3.1 Material Linkage**

*Material Linkage* merupakan isu dasar dari suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kasus. Selain itu juga merupakan fakta asli yang dapat disimpulkan secara konkret dan tak terbantahkan (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary CONflict and Cooperation on the River Meuse.* , 2016, pp. 6-8). Dalam kasus ini lebih mengarah ke hal mendasar yang menghambat proses negosiasi dan kurang efektifnya perjanjian yang telah dibuat.

#### **3.1.1 Kurangnya Implementasi *Confidence Building Measures* (CBMs)**

Pendekatan CBMs merupakan cara alternatif yang dilakukan oleh Tiongkok dan India untuk menyelesaikan konflik perbatasan. CBMs mempunyai tiga target pembahasan utama yakni usaha meningkatkan komunikasi antar kedua negara,

mengurangi ketegangan selama proses negosiasi dan meminimalisir kekuatan militer di sepanjang garis perbatasan (Chansoria, *India and China: A Case of Constrained Cooperation*, 2011, pp. 99-101).

Proses negosiasi penyelesaian sengketa perbatasan sudah dimulai sejak tahun 1981 dan masih berlangsung hingga sekarang. Terbagi menjadi tiga fase yakni fase pertama tahun 1981-1987, fase kedua 1988-2003 dan fase ketiga 2003-sekarang. Fase kedua merupakan langkah signifikan selama proses negosiasi dengan pembentukan CBMs. Perjanjian tahun 1993 dan 1996 merupakan basis dari pendekatan CBMs dengan fokus pada hubungan militer kedua negara dan definisi dari *Line of Actual Control* (LAC) (Chuan, 1989, pp. 5-9).

Penelitian ini berfokus pada fase ketiga dengan periode 2005 (*Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement*) hingga 2017 (*Momentum of Dooklam Standoff*). Pada fase pertama dan kedua implementasi CBMs belum berjalan optimal dengan beberapa kegagalan yang terjadi. Sebagai contoh, setahun pasca perjanjian CBMs fundamental tahun 1993 justru terjadi konflik militer di kawasan perbatasan dan serangan udara. Hal ini diakibatkan belum ada definisi garis yang disetujui antar kedua negara sehingga penempatan pasukan militer terlalu dekat yang rawan konflik. Bahkan pada CBMs kedua tahun 1996 juga belum menyelesaikan masalah definisi garis perbatasan. Hal ini berakibat pada tumbuhnya gesekan antar pasukan militer yang berjaga di sekitar garis perbatasan (Malik J. M., 1995, pp. 317-320).



Ide awal pembentukan CBMs tahun 1993 untuk penyelarasan LAC dan pengurangan kekuatan militer di sekitar garis perbatasan. Hal ini menjadi lompatan besar bagi perkembangan hubungan diplomasi kedua negara setelah hiatus pasca perang 1962. Pada CBMs tahun 1996 melengkapi dengan memberikan definisi jelas terhadap jumlah kekuatan militer yang diperbolehkan beroperasi di sekitar kawasan perbatasan ataupun jenis senjata yang diperbolehkan. Namun secara menyeluruh kedua CBMs fundamental ini hanya berfokus pada upaya pengurangan ketidakpercayaan, kesalahpahaman dan perbedaan pendapat tentang kegiatan militer di kawasan perbatasan (Sidhu & Yuan, *Resolving the Sino-Indian Border Dispute: Building Confidence Through Cooperative*, 2001, p. 352).

Perjanjian tahun 2005 merupakan respon dari kurangnya optimalisasi CBMs tahun 1993 dan 1996. Pada perjanjian ini lebih fokus kepada aspek fundamental proses negosiasi sengketa perbatasan antar kedua negara. Namun CBMs ini belum terealisasi dengan optimal, terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal IV dan VII pada perjanjian ini menjadi penekanan oleh India karena dilanggar oleh Tiongkok:

ARTICLE IV

The two sides will give due consideration to each other's strategic and reasonable interests, and the principle of mutual and equal security.

ARTICLE VII

In reaching a boundary settlement, the two sides shall safeguard due interests of their settled populations in the border areas (India M. C., 2005).

Dai Bingguo sebagai mantan perwakilan khusus Tiongkok dalam JWG memberikan pernyataan yang bertentangan dengan pasal IV. Tiongkok menekan India

untuk menerima tawaran agar klaim yang dilakukan di wilayah Sektor Timur disetujui. Tiongkok mendeklarasikan bahwa Tawang (Sektor Timur) secara sah merupakan bagian dari teritorialnya berdasar pada budaya dan administratif. Selain itu Dai juga menyatakan bahwa Inggris mengakui dan menerima bahwa Tawang bagian dari teritorial Tiongkok. Hal ini bertolak belakang dengan McMahon Line yang dibentuk oleh Inggris dan Tawang berada 37 kilometer di wilayah teritorial India (Chansoria, 2011, p. 10).

Tiongkok juga melanggar pasal VII dengan meningkatkan kekuatan militer di sepanjang garis perbatasan di wilayah Tibet (*bufferzone* area). Membangun pos militer di garis perbatasan hingga pos dagang di kawasan perbatasan yang ditinggali penduduk. Selain itu Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi pada Juni 2007 menyatakan bahwa keberadaan penduduk di Arunachal Pradesh tidak akan berpengaruh pada klaim Tiongkok atas wilayah tersebut. Sikap acuh Tiongkok ini sama seperti di kasus sengketa Laut China Selatan yang menolak putusan pengadilan Arbitrase bahkan tetap membangun pulau buatan di wilayah sengketa. Hal ini membuktikan bahwa CBMs yang dibentuk belum optimal dan menjadi penghambat proses negosiasi sengketa perbatasan (Chansoria, 2011, p. 11).

*Special Representative Meeting* (SRM) yang dibentuk untuk melanjutkan misi *Joint Working Group* (JWG) tidak menemukan hasil yang signifikan. JWG dan SRM merupakan usaha implementasi CBMs yang dibangun oleh kedua belah pihak. Selama 19 kali pertemuan SRM tidak ada pembahasan spesifik tentang *Line of Actual Control* (LAC) yang seharusnya menjadi pembahasan utama. Pembahasan dalam SRM lebih

mengarah kepada usaha kerjasama bidang politik, ekonomi, keamanan dan budaya namun mengesampingkan pembahasan LAC. Pada pertemuan ke 15 menjadi titik balik SRM setelah kedua belah pihak melakukan penandatanganan *Agreement on the Establishment of a Working Mechanism on Consultation and Coordination on India-China Border Affairs*. Pertemuan ke 16 ini menjadi satu-satunya forum yang membahas tentang masalah sengketa perbatasan (Chansoria, 2012, p. 18).

*Working Mechanism on Consultation and Coordination (WMCC) on India-China Border* dibentuk untuk membahas lebih dalam tentang masalah sengketa perbatasan yang selama ini dikesampingkan. Namun hal ini bertolak belakang dengan beberapa pasal didalam perjanjian. Contoh pada pasal V disebutkan bahwa “*will not discuss resolution of the Boundary Question or affect the Special Representatives Mechanism*”. WMCC menurut Tiongkok ataupun India lebih kearah forum yang memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi masalah perbatasan (Chansoria, 2012, pp. 27-29).

Berbagai forum yang telah dibentuk untuk optimalisasi CBMs tidak berjalan efektif. Terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok setahun pasca perjanjian WMCC 2012. Pada 15 April 2013, *People's Liberation Army (PLA)* Tiongkok masuk ke wilayah Ladakh (area sengketa) sejauh 19 km dan mendirikan tenda pos keamanan. Hal ini memaksa India untuk merespon pelanggaran tersebut dengan menurunkan angkatan bersenjata dan membangun pos dengan kamera pengintai. Kasus ini berlanjut dan terjadi serangan besar oleh Tiongkok terhadap India pada September 2014. Serangan tersebut sebagai respon terhadap pembangunan pos

dengan kamera pengintai dan penggalian kanal yang dilakukan oleh India. Ironisnya segala serangan yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut dilakukan setelah berbagai forum CBMs seperti JWG, SRM, WMCC, perjanjian tahun 1993, 1996, 2005 dan 2012 (Chansoria, 2016, pp. 12-14).

Pada 3 Oktober 2013 kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk tidak menggunakan kemampuan militer dengan penandatanganan *Border Defence Cooperation Agreement* (BDCA). Namun BDCA masih menimbulkan celah yang dimanfaatkan Tiongkok untuk memperkuat kedudukannya dalam proses negosiasi sengketa perbatasan. Seperti pada pasal II, tertulis bahwa kedua negara harus berbagi informasi tentang latihan militer, pesawat, operasi pembongkaran dan ranjau tetapi tidak secara spesifik menyebut jumlah atau jenisnya. Tiongkok diragukan akan memberikan informasi secara transparan mengenai kegiatan penerbangan militer ataupun pesawat kargo yang mendarat di kawasan perbatasan. Sementara pasal III menguraikan bahwa pertemuan berkala akan diwakili oleh perwira/ komando militer. Gagasan ini sudah direkomendasikan dalam beberapa forum mulai dari JWG, SRM hingga WMCC namun belum tidak memberi hasil signifikan. Pasal VI tertulis bahwa kedua belah pihak tidak akan mengikuti atau mengawasi disisi lain daerah sekitar LAC. Namun hingga saat ini definisi LAC belum ada persetujuan bersama sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap pasal ini. Pada prakteknya tidak ada perubahan signifikan yang terjadi di lapangan. Tertulis didalam kesepakatan untuk menarik mundur seluruh pasukan militer dari LAC. Namun Tiongkok justru memanfaatkan situasi tersebut untuk tawar menawar dengan India. Tiongkok bersedia

menarik mundur seluruh pasukan apabila India bersedia meruntuhkan banteng pertahanan di Chumer, Ladakh dan menarik mundur seluruh petugas patroli di kawasan LAC. India merasa terdesak dengan tawaran ini karena banteng dan patroli untuk mencegah PLA yang beberapa kali menyusup ke wilayah sengketa (Arunachal Pradesh dan Ladakh). Krisis kepercayaan justru semakin meningkat seiring dengan berbagai perjanjian CBMs yang disepakati (Chansoria, 2014).

Tiongkok merupakan pihak yang lebih dominan dalam setiap pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati. Tiongkok mempunyai kapasitas militer yang mendukung kepentingan politiknya dan kapabilitas untuk menaikkan tensi di Himalaya. Hal ini menjadi langkah pasif Tiongkok untuk meningkatkan kedudukan diplomatik dalam proses negosiasi. Insiden pelanggaran yang terjadi secara sporadis di garis perbatasan merupakan akibat dari belum adanya definisi LAC yang disetujui. Tiongkok memanfaatkan situasi ini untuk terus menegaskan klaimnya khususnya di sektor timur Arunachal Pradesh dan sektor barat Ladakh.

### **3.1.2 Pengaruh Prestise Negara (State Prestige)**

Sengketa perbatasan Tiongkok-India merupakan kasus abadi yang bertahan lama dan sulit untuk diselesaikan serta menyebabkan pertempuran militer dan kebuntuan diplomatik. Hal ini diperburuk dengan timbulnya perang tahun 1962 yang menjadikan proses negosiasi sengketa perbatasan semakin sulit. Pasca peperangan, hubungan bilateral semakin merenggang dan krisis kepercayaan yang semakin meningkat. Hal ini begitu kontras dengan perkembangan peran Tiongkok maupun India dalam urusan internasional yang signifikan dan sistematis (Fang, 2002, pp. 150-153).

Bahkan Tiongkok secara dominan mencoba memberikan citra bagus terhadap dunia internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Vietnam, Rusia dan Mongolia. Sementara India secara aktif menyelesaikan sengketa perbatasannya dengan Pakistan khususnya di daerah Rann of Kutch walaupun belum sepenuhnya (Wiegand, 2011, pp. 21-25).

#### **a. Konsep State Prestige**

*State Prestige* merupakan pengakuan publik dan penghormatan terhadap pentingnya sebuah negara dalam lingkup dan sistem internasional yang tergambar dalam pencapaian, kapasitas dan karakter. Oleh karena itu *state prestige* terkait dengan kedudukan, kehebatan, dan status yang mempunyai hubungan kuat dengan kehormatan, reputasi dan kebanggaan suatu negara. *State prestige* disebut juga sebagai *invisible hand* yang memotivasi aktor untuk terus mempertahankan citra dan kepentingan negaranya. Saat ini *state prestige* menjelma dalam proses diplomatik sebagai alat untuk mendirikan hirarki informal antar negara dan mengidentifikasi kelompok yang sebaya atau yang seimbang (kekuatan militer/ ekonomi) (Renshon, 2015, pp. 659-695). Negara mempunyai naluri untuk meningkatkan atau mempertahankan kedudukan mereka untuk mencari simbol atau status agar harga diri mereka dihargai dengan cara tertentu seperti peningkatan alutsista, penyelenggaraan acara internasional, membentuk kebijakan luar negeri yang proaktif seperti proyek bantuan asing. *State prestige* akhirnya digunakan aktor negara sebagai instrumen untuk menjaga kehormatan kepentingan negaranya (Paul & Shankar, 2014, pp. 165-171).

Terdapat tiga hal dasar yang memotivasi negara untuk mempertahankan klaim atas wilayah sengketa yakni nilai/ symbol wilayah sengketa bagi negara, dorongan politik domestik dan lingkungan geopolitik. Sementara *State Prestige* menjadi pendorong dari tiga hal dasar sebelumnya yang menjadikan proses negosiasi semakin buntu. *State Prestige* menjadi alat para elit pemimpin negara untuk tidak mengubah *status quo* atas klaim di perbatasan Tiongkok-India. Nilai/ symbol negara mempunyai peran penting untuk mengidentifikasi klaim negara dalam sengketa perbatasan. Setidaknya terdapat dua jenis nilai yang mendorong klaim negara dalam sengketa perbatasan yakni hubungan adat, etnis atau agama yang ditandai dengan *landmark* dan hubungan sejarah pendahulunya (Goertz, Gary, & Diehl, 1992, p. 11).

#### **b. Tiongkok**

Sementara Tiongkok lebih berorientasi pengamanan konsesi dalam sengketa perbatasan dengan terus mempertahankan klaim sektor timur. PM Zhou Enlai menyatakan bahwa keputusan McMahon Line sebagai garis perbatasan yang diakui oleh India merupakan penodaan terhadap martabat negara. Hal ini dikarenakan McMahon Line merupakan warisan imperialisme Inggris dan tidak ada campur tangan antar kedua negara yang bersengketa (Garver, *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century*, 2001, pp. 70-73). Selain itu Tiongkok menganggap India sebagai kasta bawah dalam sistem internasional sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk bernegosiasi dengan Tiongkok. Menurut sudut pandang Tiongkok, perang tahun 1962 merupakan peringatan bagi India karena telah bersifat keras dan provokatif. Selain itu Tiongkok secara sepihak membatalkan JWG pada tahun 1998-1999 karena

aktifitas tes nuklir yang dilakukan oleh India bersama Pakistan (Deng, 2008, pp. 237-239).

Menurut data statistik Global Fire Power, secara numerik mempunyai kemampuan alutsista yang cukup mumpuni. Total pasukan militer Tiongkok mencapai 2.693.000 dengan personel aktif 2.183.000. Selain itu Tiongkok juga mempunyai 3.035 pesawat tempur, 7.716 tank dan 714 armada kapal tempur.

Pada Juli 2017, kedua negara melakukan *military show off* di sektor timur tepatnya Arunachal Pradesh dan Tawang. Hal ini dipicu dari aktifitas India yang melakukan patroli dengan menggunakan pesawat jet di atas kawasan perbatasan. Patroli ini dilakukan oleh India sebagai respon PLA yang masuk ke wilayah sengketa perbatasan dengan menggunakan kendaraan tempur. Namun kemudian Tiongkok merespon aktifitas tersebut dengan meluncurkan dua pesawat jet tipe Sukhoi-27 yang maju kearah pesawat India. Selain itu Tiongkok juga meluncurkan dua pesawat tanpa senjata untuk melakukan pengamanan dan netralisir kawasan Arunachal Pradesh dan Tawang. Hal ini menunjukkan betapa ambisius Tiongkok menanggapi masalah perbatasan dengan segala kekuatan militernya (Vombathkere, 2014). Pada tahun yang sama, Tiongkok kembali menunjukkan kelasnya dalam bidang militer di mata internasional. Angkatan laut Tiongkok melakukan latihan militer secara masif dengan Angkatan Laut Rusia di Laut Baltik. Hampir seluruh armada kapal tempur dikerahkan dengan tujuan menunjukkan kapabilitas militernya. Hal ini dipertegas dengan parade militer Tiongkok untuk merayakan ulang tahun ke 90 PLA. Perayaan ini melibatkan lebih dari 12.000 pasukan siap tempur, 600 peralatan militer dan 100 pesawat canggih.



Rentetan acara ini dilakukan bersamaan dengan momentum *Docklam Standoff* antara Tiongkok-India di Doka La (Tikhonova, 2017).

Docklam sebagai kawasan yang disengketakan menjadi salah satu target pembangunan infrastruktur Tiongkok. Hal ini dipicu peristiwa *Docklam Standoff* yang memicu kedua negara untuk segera mengamankan wilayah yang diklaim. Tiongkok bergerak lebih cepat dengan meneruskan pembangunan jalan raya di kawasan dataran tinggi Docklam sebagai penanda kawasan strategis. Selain itu jalan raya juga digunakan sebagai akses PLA untuk menduduki kawasan strategis *Chicken Neck* atau leher ayam di kawasan koridor Siliguri. Pembangunan juga terjadi di kawasan Tibet dengan memperpanjang jalur kereta api dari Lhasa-Xigase-Yadong-Nathu La. Nathu La merupakan salah satu pos dagang lintas batas antara Tiongkok dan India. Tiongkok juga membangun jalan tol dari Tibet hingga ke Pakistan melewati jalur Karakorum (Bhonsale, 2018, pp. 24-25). Disisi perbatasan Tiongkok dibangun landasan terbang Shigatse sebagai pusat kendali pesawat tanpa awak dan rudal serta Lhasa Gonggar sebagai pusat pangkalan pesawat tempur. Pangkalan Tiongkok di kawasan perbatasan tidak sebanyak India namun mempunyai daya tempur dan fasilitas yang lebih lengkap (Marcus, 2018).

### **c. India**

Pada tahun 1959 PM Jawaharlal Nehru mengartikulasikan *state prestige* ini sebagai penghambat resolusi sengketa perbatasan. Dalam pernyataannya di Lok Shaba (majelis rendah dalam Parlemen India) bahwa tampak tidak wajar apabila dua negara besar dengan kekuatan penuh memperebutkan satu wilayah kecil dimana sebgai

besar wilayahnya di pegunungan tinggi Tibet yang tidak ditinggali oleh penduduk. Ini bukan tentang bagian kecil dari wilayah namun juga *state prestige* atau martabat nasional yang terlibat (Maxwell, *India's China War*, 2013, pp. 79-81). India sejak dini telah menggunakan *state prestige* sebagai salah satu unsur untuk menghadapi sengketa perbatasan Tiongkok-India.

Kekalahan pada perang 1962 menjadikan India harus menjunjung martabat negaranya kembali di mata internasional. Pada tahun 1981, untuk pertama kalinya proses diplomatik dibentuk kembali oleh kedua negara dan India menolak atas perubahan *status quo* yang diusulkan oleh Tiongkok. Sektor timur (Arunachal Pradesh & Tawang) yang sudah dikuasai oleh Tiongkok merupakan salah satu faktor pendorong India untuk menolak resolusi *status quo*. Penolakan atas resolusi yang digagas oleh Tiongkok karena India tidak ingin mendukung legitimasi atas klaim Tiongkok dan semakin memperburuk martabat negara di mata internasional (Kalha R. S., 2014, pp. 57-58).

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian terbesar India yakni berada di sektor timur sengketa perbatasan. Tawang menjadi wilayah sengketa yang mempunyai hubungan religi dengan India dimana merupakan salah satu tempat ibadah terbesar bagi kaum Budha. Namun Tiongkok menepis klaim tersebut dengan bukti warisan sejarah Dinasti Qing yang menyatakan Tawang merupakan bagian dari teritorialnya (Garver, *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century*, 2001, pp. 56-58)

India saat ini menduduki peringkat keempat didunia dalam jumlah dan kapasitas militernya. (Dutta, 2017) Berdasar data statistik Global Fire Power, secara

numerik India mempunyai kapasitas yang lumayan banyak dengan 4.207.250 dengan tenaga aktif 1.362.500. Selain itu juga mempunyai alat alutsista yang mumpuni dengan 2.185 pesawat tempur berbagai jenis, 4.426 tank dan 295 armada kapal tempur (Global Fire Power, 2018).

Ancaman berbahaya akan terjadi bila kedua negara saling beradu kekuatan senjata nuklir. Tiongkok maupun India memiliki pusat penelitian pengembangan energi nuklir yang dibarengi dengan pembuatan senjata nuklir. Pada tahun 1998 menjadi pemicu reaksi Tiongkok mengenai senjata nuklir. India melakukan uji coba nuklir di sekitar kawasan perbatasan Arunachal Pradesh yang dianggap telah melanggar perjanjian damai yang berimbas pada dibatalkannya JWG ke 13. Kemudian Tiongkok merespon hal tersebut dengan membangun pusat penelitian energi nuklir di kawasan PoK. Selain pusat penelitian, Tiongkok juga membangun empat hulu ledak nuklir di kawasan tersebut. Tiongkok sejauh ini tetap mempertahankan martabat negaranya diatas India dengan terus menandingi kapasitas militernya (Sidhu & Yuan, 2001, p. 356).

Sementara India juga terus mengejar pembangunan jalan tol 608 km di sepanjang garis perbatasan. Selain itu India juga aktif mengaktifkan kembali dan membangun pangkalan udara di Ladakh yang berjarak 20 km dari Tiongkok. Jalur kereta api juga menjadi prioritas yang dibangun 1.000 km di sepanjang garis perbatasan melewati Missamari hingga Tawang. Jalur tersebut meliputi 378 km di Assam, ParashramKund-Rupai, 256 km di Assam-Arunachal Pradesh dan Bilaspur-Mandi-Manali-Leh serta 498 km di Himachal Pradesh-Jammu dan Kashmir (Bhonsale, 2018,

pp. 24-25). Pembangunan landasan terbang strategis dibangun oleh kedua negara di sekitar dataran tinggi Docklam. Disisi perbatasan India membangun landasan terbang Siliguri Bagdodra untuk helikopter tempur dan Hasimara untuk landasan terbang pesawat tempur (Marcus, 2018).

Sementara adu kompetisi pembangunan di kawasan perbatasan merupakan langkah yang ditempuh kedua negara untuk tetap menjaga prestisnya. Pembangunan di kawasan perbatasan dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian yang telah dilakukan yakni menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan selama proses negosiasi berlangsung. Pembangunan di kawasan pebatasan dilakukan dengan niat untuk memberikan kemudahan akses bagi para tentaranya untuk mencapai target atau distribusi senjata. Selain itu, Tiongkok maupun India akan terus melakukan perlawanan atau *infrastructure race* sebagai langkah menyelamatkan martabat bangsa (TNN, 2011).

### **3.2 Political Linkage**

Sebuah struktur dalam sistem internasional yang menghubungkan antara satu negara dengan negara yang lainnya atau satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lainnya (Warner, Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary CONflict and Cooperation on the River Meuse. , 2016, pp. 12-15). Dalam kasus ini lebih mengarah kepada kombinasi isu-isu sosial dan politik yang berhubungan dengan isu dasar yakni sengketa perbatasan.

### **3.2.1 Pengaruh Tibet dalam Sengketa Perbatasan Tiongkok dan India**

Sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India telah berlangsung selama lebih dari enam dekade. Berbagai proses negosiasi telah dilakukan namun belum menemukan hasil yang signifikan hingga kini. Penyebab lambatnya proses negosiasi tidak hanya muncul dari internal (perjanjian) namun juga faktor eksternal termasuk keterlibatan Tibet. Tibet menjadi hal yang selalu disebutkan dalam proses negosiasi walaupun hanya sebagai alat dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Selain itu, posisi Tibet hanya digunakan oleh kedua belah pihak untuk memperluas hubungan bilateral dan bukan untuk tujuan resolusi konflik. Pengaruh Tibet dalam kasus ini tidak hanya sebatas Dalai Lama ataupun pengungsi Tibet di India namun juga keterlibatan konflik Tiongkok-Tibet didalamnya.

Hubungan Tiongkok-Tibet mempunyai pengaruh terhadap keberlangsungan proses negosiasi sengketa perbatasan Tiongkok-India. Sebagai bukti proses negosiasi Tiongkok-India runtuh pada tahun 1986 berbarengan dengan runtuhnya hubungan bilateral Tiongkok-Tibet yang sudah dibangun sejak 1979. Semenjak kejadian itu, India memberikan akses kepada Dalai Lama untuk melakukan aktifitas politik internasional khususnya kunjungan perdananya ke Washington DC. Hal ini bertujuan untuk internasionalisasi masalah Tibet untuk meminta bantuan internasional (Goldstein, 1989, pp. 251-254). Kunjungan Dalai Lama ke Washington DC merupakan kontribusinya atas aksi pro kemerdekaan di ibukota Lhasa. Resolusi yang dibentuk dengan penandatanganan perjanjian tahun 2005 tidak bertahan lama, pada tahun 2006 duta besar Tiongkok di New Delhi menyatakan klaimnya atas Arunachal Pradesh

beserta Tawang. Tawang menjadi bagian penting yang klaimnya diprotes keras oleh Tibet karena merupakan situs Biara Tibet terbesar dan tempat kelahiran Dalai Lama keenam (Ganguly, 2004, p. 115).

Secara menyeluruh terdapat tiga poin analisis yang menjadi pertimbangan dalam keterlibatan Tibet di kasus ini. Pertama, status Tibet sebagai wilayah independen atau bagian dari otonomi Tiongkok. Kedua, kebijakan India atas kegiatan pengungsi Tibet di wilayah teritorialnya seperti pembentukan pemerintahan Tibet sementara di pengasingan dan kepastian atas posisi dan status pemimpin agama Dalai Lama. Ketiga, ketakutan India atas keberadaan militer Tiongkok (PLA) di dataran tinggi Tibet dan sepanjang garis perbatasan (Chellaney, *Asian Juggernaut: The Rise of China, India and Japan*, 2006, pp. 151-153).

Pertama, secara *de facto* India telah mengakui Tibet sebagai bagian dari otonomi Tiongkok pada 29 April 1954 pasca penandatanganan *India-China Agreement on Trade and Intercourse between Tibet Region of China and India*. Pengakuan ini kembali ditegaskan pada 23 Desember 1988 dengan *Sino-Indian Joint Press Communique* dan pada 25 Juni 2003 dengan penandatanganan *Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation* serta pada 11 April 2005 dalam *Joint Statement India-China*. Dalam surat yang dikirim pada 5 November 1962 ke pemimpin negara Asia Afrika menekankan bahwa seluruh nama sungai, jalan dan *landmark* lainnya di Arunachal Pradesh dan Aksai Chin berbahasa Tibet (Norbu, 2001, pp. 7-11). Hal ini menjadi modal Tiongkok untuk memperkuat posisinya dalam proses negosiasi sengketa perbatasan yang melibatkan wilayah Tibet.

Tibet menjadi titik pusat untuk segketa perbatasan khususnya bagi Tiongkok. Sejak India menerima Tibet sebagai bagian dari otonomi Tiongkok, ekspansi dilakukan dan menjadikannya kawasan strategis untuk mengontrol kawasan perbatasan. Bagian barat wilayah Tibet menjadi titik strategis untuk mengatur Aksai Chin (sektor barat) dan bagian timur Tibet menjadi titik untuk mengatur Arunachal Pradesh (sektor timur).

Kedua, India belum konsisten menerapkan kebijakan yang telah dibentuk terhadap keberlangsungan pengungsi Tibet di wilayah teritorialnya. Secara resmi India melarang kegiatan anti-China yang dilakukan oleh para pengungsi Tibet di wilayahnya namun masih memperbolehkan orang-orang Tibet untuk membentuk pemerintahan di pengasingan. India bahkan memberikan dukungan dan bantuan atas keberlangsungan Central Tibetan Administration dan memfasilitasi Dalai Lama untuk melakukan aktivitas politik internasionalnya (Mohan, 2003, pp. 257-259).

Para pengungsi Tibet masuk ke wilayah India mulai tahun 1950 pasca penjajahan yang dilakukan oleh Tiongkok. Pengungsi ini kemudian tinggal di Kalimpong, West Bengal untuk mendapatkan perlindungan dan membentuk pengasingan. Perpindahan penduduk secara masif ini diakibatkan kekerasan yang dilakukan oleh PLA terhadap para penduduk lokal Tibet. Penyerangan bersenjata dan peluncuran rudal yang dilakukan oleh PLA dipicu oleh aksi protes warga Tibet atas penjajahan yang dilakukan oleh Tiongkok. Aktivitas PLA dalam penyerangan dan pengejaran para gerilya Tibet tidak hanya dilakukan di wilayah Tibet namun hingga melewati perbatasan Tiongkok-India (Jain, 1981, pp. 167-168).

Tiongkok maupun India mempunyai kepentingan yang sama atas posisi Tibet. India akan terus mendukung kegiatan orang-orang Tibet di pengasingan sebagai salah satu kepentingan nasionalnya untuk menghidupkan kembali Tibet sebagai *bufferzone* antar kedua belah pihak. Sementara itu Tiongkok mengencam kegiatan dukungan dan bantuan yang dilakukan oleh India terhadap Tibet karena dianggap mengganggu urusan internal (Tibet bagian dari otonomi Tiongkok) dan merusak proses negosiasi antar kedua negara (Jain, 1981, pp. 98-99).

Posisi Tibet menjadi penting dan signifikan apabila para elit politik termasuk Dalai Lama dan penduduknya di pengasingan menuntut untuk merdeka. Skenario terburuk bagi Tiongkok adalah berkurangnya wilayah territorial dari 2,5 juta km<sup>2</sup> dan akan menyusut ribuan km. Beberapa wilayah seperti Tianshui, Gansu dan Sichuan, Chengdu (Tiongkok bagian tengah) yang sebelumnya merupakan wilayah belakang nantinya akan berjarak 100 km dari perbatasan dan menjadi garda pos terdepan. Selanjutnya Tibet beraliansi dengan India dan memberikan akses pasukan India untuk masuk ke Tiongkok tengah dengan bebas. Peperangan akan terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Tiongkok tanpa perantara Tibet dan menjadi ancaman berbahaya bagi Tiongkok. Resiko inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan para elit Tiongkok untuk tidak memberikan kemerdekaan bagi Tibet atau membiarkan India mendukung kemerdekaan Tibet (Wang & Shakyia, 2009, pp. 25-28).

Ketiga, India mempunyai ketakutan yang sama atas Tiongkok sama seperti yang disebutkan di poin kedua. Tibet masih menjadi titik pusat antar kedua negara dalam sengketa perbatasan. Pasca perang tahun 1962, Tiongkok belum menarik



kembali pasukannya (PLA) dari kawasan Tibet khususnya di dataran tinggi dan sepanjang garis perbatasan. Pada tahun 1990 terhitung 500.000 pasukan PLA masuk ke seluruh area dataran tinggi Tibet, selain itu 150.000 pasukan di sektor timur dan 40.000 di sepanjang garis perbatasan lainnya. Ketakutan India lainnya yakni infrastruktur pertahanan yang dibangun Tiongkok berupa landasan udara dan jalan yang terbentang melewati Nepal, Pakistan, India hingga Xinjiang. Hal ini akan menjadi kekhawatiran berlebih oleh India jika melihat peperangan yang terjadi pada tahun 1962 (Norbu, 2001, pp. 18-20). Tibet akan memberikan pengaruh besar terhadap dua negara besar yang sedang beradu kepentingan untuk sengketa perbatasannya.

Tiongkok menjadi pihak yang lebih dominan menentukan arah negosiasi sengketa perbatasan dengan India. Jika dilihat dari sejarah, Jawaharlal Nehru menerima Tibet bagian dari Tiongkok dengan penandatanganan *India-China Agreement on Trade and Intercourse between Tibet Region of China and India* (1954) berharap seluruh urusan sengketa perbatasan sudah selesai namun ternyata tidak. Tiongkok justru merilis peta yang menggambarkan sebagian wilayah India (Arunachal Pradesh, Sikkim & Aksai Chin) masuk dalam teritorial Tiongkok. Jika dilihat dari sudut pandang Tiongkok, kemerdekaan Tibet akan menjadi resolusi awal penyelesaian konflik antara Tiongkok dan Tibet. Pemerintahan Tibet akan mudah dipengaruhi oleh Tiongkok untuk memperkuat legitimasi aksi klaimnya. Sementara dari sudut pandang India, Tibet akan berdiri di belakang India untuk mencapai resolusi dan bergerak melalui pengasingan dan kemerdekaan Tibet akan menjadi pendukung dengan gerakan sparatisnya. Namun, penyelesaian masalah Tibet menjadi kunci untuk memecahkan masalah perbatasan dan

untuk meredakan persaingan strategis. Secara tidak sadar, Tibet menjadi dasar yang membentuk hubungan politik antara Tiongkok & India sehingga penyelesaian masalah Tibet menjadi utama dalam upaya resolusi sengketa perbatasan (Norbu, 2001, pp. 41-42).

### **3.2.2 Pengaruh Pakistan dalam Hubungan Bilateral Tiongkok-India**

Perkembangan aliansi antara Tiongkok dan Pakistan mulai terlihat pasca perang antara Tiongkok dan India tahun 1962. Kedua negara menggambarkan hubungan mereka sebagai *one nation two countries* bahkan PM Tiongkok Wen Jiabao menekankannya sebagai *brother forever*. Pada tahun 2005, Tiongkok dan Pakistan semakin tegas dengan penandatanganan *Treaty of Friendship and Cooperation and Good Neighbourly Relations*. Dukungan Tiongkok terhadap Pakistan juga dilancarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tiongkok menolak dan memprotes naskah resolusi Soviet bahkan Amerika yang dianggap gagal meredam serangan India ke Pakistan. Namun akhirnya Tiongkok mengusulkan naskah resolusi atas penyerangan yang dilakukan India ke Pakistan dan memaksa tentara India untuk mundur tanpa syarat. India mendapat bagian terberat dari hubungan Tiongkok-Pakistan ini selagi masalah perbatasan antara India-Pakistan ataupun India-Tiongkok juga belum selesai (Jetly, 1979, pp. 267-273).

Sejak tahun 1960 Tiongkok terus memberikan bantuan dana ataupun tenaga kerja kepada Pakistan untuk mengembangkan industri dan kompleks penerbangan di Islamabad. Hal yang paling berdampak bagi keamanan nasional India yakni kegiatan distribusi bantuan senjata dan teknologi nuklir ke Pakistan. Teknologi nuklir jenis M

11 (1991-1992) dan M-9 (1993) dengan area tembak hingga ke wilayah India. Namun India menganggap bahwa distribusi teknologi nuklir ini melanggar *Missile Technology Control Regime* (MTCR) (An, 2012). Selain teknologi nuklir, Tiongkok juga memberikan bantuan berupa jet tempur dan kapal perang induk dalam jangka waktu dari 2009 hingga 2013. Kerjasama pertahanan ini dipertegas dengan penandatanganan *Sino-Pakistan Border Agreement* tahun 2011 yang berbarengan dengan penandatanganan kerjasama bidang ekonomi, teknologi, keuangan dan sumber energi (An, 2011).

Kehadiran Tiongkok di *Pakistan Occupied Kashmir* (PoK) menjadi masalah lain yang menjadikan konflik Tiongkok-India semakin rumit khususnya sengketa perbatasan. Sejauh ini Tiongkok telah menguasai 20% dari tanah sengketa yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Secara detail Tiongkok telah menguasai 38.000 km<sup>2</sup> di Aksai Chin dan 5.180 km<sup>2</sup> di Kashmir (Malik M. , 2010). Pakistan telah menyerahkan sengketa perbatasan di wilayah Kashmir kepada Tiongkok untuk maju sebagai representatif dalam proses negosiasi dengan India.

Tiongkok juga mulai mempertegas kehadirannya di PoK dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Karakoram. Tujuan utama Tiongkok dalam pembangunan jalan ini untuk mempermudah akses distribusi minyak dari Gulf ke Gwadar di Balochistan. Sebagai keuntungan ekonomi bersama, Gwadar akan dibentuk sebagai kawasan industri bebas pajak serta jalur kereta yang melewati Jalur Sutra kuno. Namun pembangunan markas kapal perang di pelabuhan Gwadar menjadi ancaman bagi keamanan India (Malhotra, 2012, pp. 71-75). Pembangunan jalan tol Karakoram juga menjadi strategi Tiongkok untuk mengontrol para kelompok separatis Uighur yang

menginginkan kemerdekaan Turkmenistan Timur. Keamanan Pakistan dan Tiongkok lebih mudah menahan dan menangkap semua kelompok sparatis Uighur yang melewati jalan Karakorum (Varma, 2010).

Posisi Tiongkok semakin meningkat dengan membangun *Hydro Power Project* bekerjasama dengan Pakistan. India mulai resah karena wilayah yang menjadi lokasi pembangunan bendungan di kawasan sengketa dan illegal. Namun Tiongkok secara tegas mengabaikan itu dan justru mengundang para pengusaha Tiongkok untuk membangun 12 bendungan lagi di sekitar kawasan tersebut. Selain itu sebagai dalih pengamanan pembangunan infrastruktur, lebih dari 11.000 tentara PLA masuk ke kawasan PoK. Para tentara PLA ini juga membuat 22 terowongan rahasia bahkan orang-orang Pakistan juga tidak mendapatkan akses kesana. Tiongkok berdalih bahwa terowongan tersebut digunakan sebagai jalur pipa gas menuju ke Xinjiang. Selain itu dibangun juga kompleks perumahan permanen yang digunakan untuk tempat tinggal para tentara PLA dan pekerja Tiongkok di kawasan PoK. Hal ini akan semakin mempersulit proses negosiasi sengketa perbatasan India Tiongkok karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok (Harrison, 2010).

Nuklir menjadi hal yang paling dikhawatirkan oleh India dari segala aktivitas Tiongkok yang dilakukan di PoK. Kerjasama Tiongkok-Pakistan tentang nuklir dimulai tahun 1991 (Chasma 1) yang kemudian di perbaharui tahun 2004 (Chasma 2). Pada tahun 2005 India-Amerika merealisasikan Kesepakatan 123 yang bergerak dibidang nuklir. Hal ini kemudian langsung ditanggapi oleh Tiongkok pada tahun 2008 dengan membantu Pakistan untuk membangun reaktor nuklir Chasma 3 dan Chasma

4. Hal ini menciptakan dinamika persaingan pertahanan semakin kuat dan berbahaya. Sehingga India mengusulkan dunia internasional untuk mengosiasikan *Fissile Cut-off Treaty* (FMCT) yang terverifikasi untuk menerapkan kontrol ekspor ketat dan tidak berbagi teknologi nuklir. Namun Tiongkok memberikan pembelaan bahwa bantuan ekonomi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami Pakistan sehingga dibutuhkan tindakan langsung seperti sumber daya energi (Yang, 2010).

Tiongkok dengan dukungan Amerika telah melanggar kesepakatan anggota *Nuclear Supplier Group* (NSG) untuk tidak memasok nuklir kepada non anggota NSG. Toleransi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk secara bebas menyediakan energi nuklir ke Pakistan. Hal ini membahayakan keamanan nasional India jika berlangsung secara terus menerus karena pusat pengembangan nuklir berada di kawasan PoK. Selain itu Tiongkok melanggar lima prinsip dasar Panchsheel untuk menjaga perdamaian dan stabilitas selama proses negosiasi sengketa perbatasan. Hal yang ditakutkan dari aktifitas transfer teknologi nuklir jika jatuh ditangan yang salah seperti rekam jejak yang terjadi di Libya, Korea Utara dan Iran. Oleh karena itu India menginginkan transparansi terhadap segala aktifitas nuklir yang terjadi di PoK. Hingga saat ini Pakistan mempunyai kapasitas untuk menciptakan hingga sepuluh hulu ledak setiap tahunnya. Menurut mantan Kepala Komite Intelejen India bahwa senjata nuklir Pakistan dipersiapkan untuk menghadapi serangan yang sewaktu-waktu dilancarkan oleh India (TNN, 2011).

Asia Selatan sebagai target terorisme selama dua dekade terakhir memperburuk situasi hubungan Tiongkok-Pakistan-India. Pakistan merupakan salah satu kawasan

pusat perkembangan jaringan terorisme, namun Tiongkok belum mengeluarkan respon positif dan aktif mengenai ini. Tiongkok bahkan tidak merespon terhadap serangan teroris yang terjadi di Mumbai pada tahun 2008. Namun India mendapat posisi untuk beraliansi dengan Amerika karena kerenggangan hubungan Amerika-Pakistan pasca pembunuhan Osama bin Laden. Aliansi India-Amerika ini untuk merespon masifnya kerjasama antara Tiongkok-Pakistan. Kerjasama India-Amerika lebih jelas, transparan dan tegas seperti penolakan India atas tawaran jet tempur. Hal ini merupakan usaha India untuk meredam kompetisi senjata di kawasan PoK. Namun Tiongkok belum juga mengembalikan sikap *coexistence and stability* sesuai dengan perjanjian Panchsheel (Li, 2010).

Tiongkok ingin mengimbangi kekuatan India di Asia Selatan dengan perantara Pakistan. Efek timbal balik juga dirasakan Pakistan dengan perlindungan Tiongkok khususnya di PoK. Pengaruh Tiongkok mulai terlihat dengan berpindahnya Pakistan dari sisi Amerika dan kini berjalan bersama dengan Tiongkok. Sementara relasi Tiongkok-Pakistan yang berbanding terbalik dengan Tiongkok-India menandai masih tingginya defisit kepercayaan antar kedua negara. Keamanan nasional India akan semakin terancam jika Tiongkok semakin memperluas pengaruhnya di Asia Selatan, tidak hanya di Pakistan. Sehingga saat ini Pakistan masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap keberlangsungan hubungan diplomatik Tiongkok-India (Orton, 2010, pp. 55-56).

### **3.3 Bargaining Linkage**

Menghubungkan isu dengan isu lain sebagai opsi tawar menawar yang memberikan dampak positif ataupun negatif dalam perkembangan isu bagi kedua belah pihak (Warner, *Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary CONflict and Cooperation on the River Meuse.* , 2016, pp. 7-8). Dal hal ini cenderung kepada interdependensi ekonomi atau perdagangan.

#### **3.3.1 Pengaruh Ekonomi dan Perdagangan**

Pada tahap awal kerjasama ekonomi Tiongkok-India yakni India-China Joint Economic Group on Economic Relations and Trade, Science and Technology. Pertumbuhan begitu seignifikan dari 264 juta USD pada 1990 hingga 2,9 miliar USD pada tahun 2000 (Dolla, 2011, pp. 64-66). Hubungan timbal balik perdagangan Tiongkok-India semakin berkembang dengan ekspor impor barang mentah. Masuknya Tiongkok di World Trade Center (WTO) 2011 juga memperluas jangkauan pasar ekspor termasuk India. Pada tahun 2006 dilakukan penandatanganan *Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement* dan menargetkan 40 miliar USD untuk perdagangan bilateral (Basu, 2001). Penurunan tren perdagangan pasca krisis tahun 2007-2008 sebesar 25% dengan cepat ditutup oleh kedua belah pihak. Sejak tahun 2009 pertumbuhan hubungan dagang kedua negara meningkat secara signifikan hingga puncaknya pada tahun 2015 mencapai 80 juta USD. Nilai ekspor Tiongkok ke India lebih dari 66,7 USD sementara nilai ekspor India ke Tiongkok berjumlah 6,5 miliar USD. Pada tahun 2011 Tiongkok melakukan MoU untuk membiayai pembangunan 16 GW tenaga batubara (Hannam, 2015).

Interdependensi ekonomi dan perdamaian digagas pada Perang Dunia Pertama oleh Woodrow Wilson dan semakin populer pasca Perang Dunia Kedua seiring dengan munculnya globalisasi (Kant, 1957, pp. 5-6). Hal yang paling dominan terlihat yakni investasi langsung yang masuk ke wilayah sengketa akan mempengaruhi kondisi perselisihan territorial. Investor akan memberikan cukup tekanan ke pemerintah untuk mempengaruhi langkah resolusi sengketa perbatasan seperti negosiasi atau militer. Perdagangan dan era globalisasi memaksa perang dibuat dengan biaya mahal untuk meminimalisir negara yang ingin terlibat. Sehingga untuk saat ini negara harus mempromosikan perdagangan tidak hanya untuk keuntungan ekonomi tapi juga untuk mempromosikan perdamaian (Copeland, 1996, pp. 3-4).

Namun Kenneth Waltz berpendapat bahwa ketergantungan ekonomi akan menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam perdagangan dan menciptakan persepsi menjatuhkan yang lemah demi kepentingan nasionalnya. Kekuatan besar akan lebih kebal terhadap fluktuasi perdagangan dalam hubungan bilateral. Sebagai contoh, pada tahun 2013 Tiongkok mengeksploitasi Jepang atas ketergantungan impor logam bumi langka untuk memaksa Jepang mengekstradisi nelayan kapal Tiongkok yang sengaja bertabrakan dengan penjaga pantai Jepang di kepulauan Senkaku (Bradsher, 2010). Melihat hal ini ketergantungan ekonomi bertindak sebagai kekuatan untuk menentukan opsi tindakan dengan negosiasi atau militer. Sementara suatu negara akan sangat sensitive ketika terjadi pemotongan perdagangan tiba-tiba yang akan berdampak pada kesejahteraan nasional (Caruso, 2003, pp. 49-51).



Skenario *win-win solution* jelas belum terwujud dalam keseimbangan perdagangan Tiongkok-India. Jika dilihat dari porsi total perdagangan Tiongkok pada tahun 2014 mencapai 4,3 triliun USD dan India hanya menyumbang 1,6% sekitar 71,6 miliar USD. Krisis kepercayaan yang terjadi dalam sengketa perbatasan mempunyai timbal balik dengan krisis kepercayaan yang terjadi di perdagangan. Kebuntuan yang terjadi dalam proses negosiasi sengketa perbatasan juga berimbas pada perdagangan. Perusahaan telekomunikasi Huawei dan ZTE telah dilarang untuk memasok GSM (sistem global untuk seluler komunikasi) di zona utara dan timur India. Hal ini dipicu kekhawatiran pejabat keamanan nasional India atas penggunaan teknologi tersebut untuk memata-matai atau menyebarkan *malware*. Sebaliknya Tiongkok mengalihkan industri perangkat lunak dari India walaupun kualitas sudah diakui secara global (Huang, 2011, pp. 111-115).

Perdagangan Tiongkok dan India menimbulkan ketidakseimbangan terbukti dengan tren pertumbuhan defisit yang signifikan. India diserbu dengan barang-barang murah Tiongkok yang merusak harga produk lokal. Pelabuhan besar Tiongkok menjadi ancaman jangka panjang bagi bisnis kecil India. Ketidakseimbangan yang sudah kronis ini memaksa India untuk menentukan kebijakan tegas dengan mewajibkan hanya 21% peralatan di impor dari Tiongkok. India kemudian melakukan penyaringan terhadap barang impor dari Tiongkok dan menghasilkan 120 produk Tiongkok di blokir. Selain itu, India juga menolak perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan oleh Tiongkok. Para ahli India menganggap bahwa perjanjian ini akan semakin merugikan India karena

mengurangi tarif impor ekspor dan distribusi barang dari Tiongkok semakin masif (Singh B. K., 2011, pp. 177-178).

### **3.4 Organisational and Procedural Linkage**

Struktur yang didalamnya menghubungkan otoritas atau institusi dengan negara atau pemerintahan. *Organisational Linkages* bisa disebut juga sebagai *management system* yang mempunyai metode untuk mengatur suatu isu yang melibatkan anggotanya (Warner, Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and Cooperation on the River Meuse. , 2016, p. 5).

#### **3.4.1 Posisi South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) dalam Sengketa Perbatasan India-Tiongkok**

SAARC dibentuk pada Desember 1985 dengan anggota Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri lanka dan Afghanistan. Selama dibentuk, organisasi regional ini belum mempunyai ketegasan atau bahkan peran signifikan terhadap anggotanya. Seperti pada November 2016, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAARC ditunda disebabkan ketakutan para anggotanya terhadap isu teror lintas batas. Penundaan KTT SAARC dan memburuknya hubungan India-Pakistan membuat kondisi regional tidak stabil. Ketidakstabilan posisi SAARC sebagai organisasi regional mempermudah intervensi internasional terhadap masalah regional (Bhattacharjee, 2016).

Tiongkok sebagai negara adidaya yang paling dekat dengan Asia Selatan mempunyai pengaruh dan kekuatan untuk masuk dalam ranah SAARC. Pada November 2014, Tiongkok menjadi dewan pengamat dalam KTT ke 18 di Kathmandu.

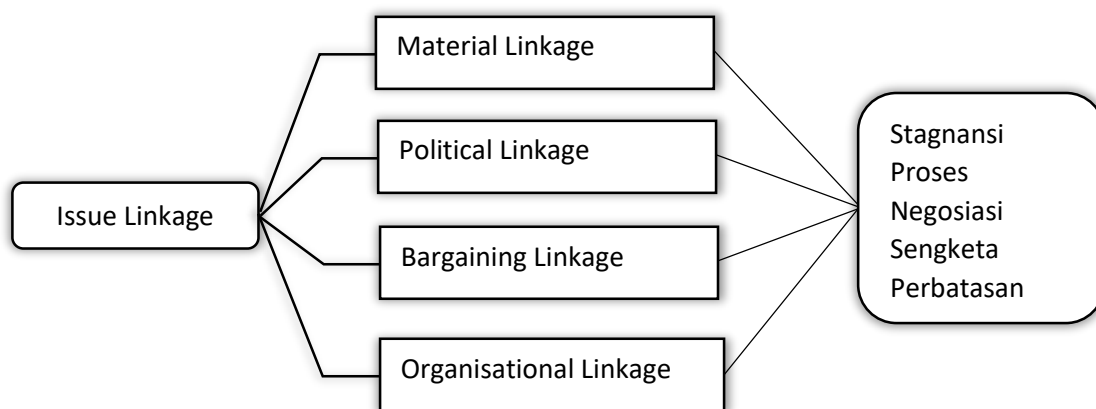
Dalam kesempatan tersebut Tiongkok sudah mulai mengutarakan minatnya untuk masuk sebagai salah satu anggota SAARC. Kemudian India menjadi negara yang paling menentang niat tersebut karena alasan geopolitik. India menganggap bahwa Tiongkok tidak mempunyai hubungan sejarah maupun budaya dengan orang-orang Asia Selatan. Namun Tiongkok mempunyai hubungan geo-ekonomi dalam hal perdagangan dan pembangunan yang erat dengan anggota SAARC seperti Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka. Hal ini berimbas pada dukungan separuh anggota SAARC (Pakistan, Sri Lanka, Nepal dan Maladewa). Ketakutan India lainnya yakni provokasi Tiongkok terhadap anggota SAARC untuk membentuk aliansi anti India atas dominasinya di Asia Selatan selama ini (Ahmar, 2017).

Keberadaan SAARC sebagai organisasi regional di Asia Selatan akan menjadi dilema khususnya dalam sengketa perbatasan Tiongkok-India. SAARC tidak tegas dengan fungsinya sebagai organisasi regional seperti ketergantungan Pakistan terhadap forum multilateral untuk menyelesaikan sengketa perbatasannya dibanding percaya dengan SAARC. Hal ini disebabkan terjadinya perpecahan antar anggota dengan terbentuknya sub-SAARC seperti sub-SAARC *Motor Vehicle Agreement for the Resolution of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic* dengan anggota Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN). Selain itu juga dibentuk kelompok yang lebih besar yakni *South Asia Sub-Regional Economic Cooperation* (SASEC) dan *Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation* (BIMSTEC) yang bahkan melibatkan Myanmar dan Thailand. Sementara Pakistan semakin aktif membangun konektivitas dengan negara non anggota SAARC seperti

*China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) dan kenggotannya dalam *Shanghai Co-Operation Organisation* (SCO). Hal ini menunjukkan tidak adanya tujuan bersama antar anggota SAARC bahkan justru menciptakan persaingan didalamnya. Selain itu hegemoni India dalam ekonomi dan politik di SAARC telah menyebarkan sentimen anti-India dan semakin membuka kesempatan Tiongkok untuk masuk sebagai pihak yang dapat menralisir hegemoni tersebut (Kumar V. , 2016).

SAARC tidak mempunyai peran signifikan dalam sengketa perbatasan Tiongkok-India karena kedua negara lebih mengutamakan penyelesaian secara bilateral. Lebih lagi organisasi regional yang sudah terbentuk sejak tahun 1985 ini belum mampu untuk mengatur pertemuan sejak 1988. Tiga belas dari tiga puluh satu pertemuan KTT yang telah dilakukan tidak berjalan sesuai jadwal. Hingga KTT terakhir pada tahun 2014 di Kathmandu tidak dilakukan pembahasan mengenai sengketa perbatasan Tiongkok-India meskipun Tiongkok hadir dalam KTT tersebut sebagai dewan pengamat. Hal ini membuktikan keberadaan SAARC belum mempunyai kapasitas sebagai organisasi regional baik bagi permasalahan intra regionalnya maupun luar regional (White, 2015, p. 7).

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *organizational linkage* termasuk dalam aspek *non linkage* karena tidak mempunyai hubungan aktif dengan isu utama. SAARC tidak mempunyai posisi tawar yang signifikan karena eksistensinya yang belum memadai sebagai organisasi regional. Selain itu SAARC belum mempunyai peran dalam sengketa perbatasan Tiongkok-India bahkan dalam KTT SAARC.



Penulis menggunakan teori *issue linkage* sebagai alat untuk menganalisa isu sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebuntuan proses negosiasi yang berakibat pada terhambatnya resolusi konflik. Terdapat empat variabel yang digunakan yakni *Material Linkage*, *Political Linkage*, *Bargaining Linkage* dan *Organisational Linkage*. Melihat hasil dari penelitian menggunakan variabel diatas bahwa penyelesaian suatu konflik ataupun sengketa perbatasan tidak hanya berpatok pada proses negosiasinya namun juga keterlibatan isu lain. Namun juga perlu diketahui terlebih dahulu hal mendasar yang menyebabkan proses negosiasi tidak berjalan optimal dan perjanjian yang telah dilakukan kurang efektif. Variabel *material linkage* berperan sebagai alat analisis untuk mengetahui hal tersebut dengan melihat implementasi CBMs dan pengaruh *state prestige*. Setelah itu menelaah faktor lain yang mempengaruhi ketidakstabilan proses negosiasi. Variabel *political linkage* digunakan untuk menganalisis pengaruh negara yang mempunyai hubungan dengan kedua belah pihak yakni Pakistan dan Tibet. Negara yang mempunyai kedekatan secara geografis, politik ataupun budaya. Variabel *bargaining linkage* digunakan untuk mengetahui hal yang

sering digunakan kedua belah pihak untuk melakukan tawar menawar kebijakan yakni ekonomi dan perdagangan. Interdependensi ekonomi ternyata menimbulkan efek menjatuhkan salah satu pihak dan menguntungkan bagi yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih. Terakhir *organizational linkage* menjadi variabel untuk mengetahui peran organisasi regional dalam kasus tersebut. Namun ternyata SAARC selaku organisasi regional di Asia Selatan belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan isu tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hubungan diplomasi antara Tiongkok dan India dimulai sejak 31 Desember 1949. Satu dekade hingga 8 September 1959 menjadi fase buruk bagi kedua negara dalam kasus sengketa perbatasan. Wilayah sengketa perbatasan terbagi menjadi tiga sektor besar yakni Sektor Timur, Tengah dan Barat. Sektor Timur. Sektor Timur terbentang sepanjang McMahon Line termasuk Arunachal Pradesh dan Tawang. Sektor Tengah meliputi Tibet-Kashmir-Punjab hingga Uttar Pradesh. Sektor Barat meliputi Aksai Chin yang merupakan pusat sengketa di wilayah barat.

Perjanjian Panchsheel menjadi prinsip dasar dari hubungan diplomatik antara Tiongkok dan India. Perjanjian tersebut terdiri dari lima prinsip dasar yakni menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, tidak ada agresi militer, tidak mencampuri urusan militer, kesetaraan dan keuntungan bersama dan koeksistensi perdamaian.

Sengketa perbatasan semakin kompleks ketika Tiongkok menolak garis perbatasan McMahon Line yang dibentuk oleh Imperialis Inggris yang berujung pada perang tahun 1962. Perubahan arah penyelesaian sengketa dimulai sejak tahun 1980 yang lebih representatif bagi kedua belah pihak. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan alur politik dan prinsip dengan prinsip

perdamaian dan keadilan. Pada April 2005 dibentuklah *Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India China Boundary* yang menjadi landasan hubungan diplomatik membahas tentang sengketa perbatasan. Perjanjian dibentuk sebagai penekanan dari perjanjian tahun 1993 dan 1996. Pada tahun 1993 menandatangani *Agreement on Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control (LAC) China-India* yang sering disebut sebagai *Confidence Building Measures (CBMs)* fundamental. Pada tahun 1996 menandatangani *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility*.

Berbagai forum telah dibentuk pasaca penandatanganan perjanjian tahun 2005 untuk memfasilitasi kedua negara membahas masalah perbatasan. Pertama, *Joint Working Group (JWG)* yang dibentuk sebagai wadah untuk membahas mengenai interaksi militer kedua negara. Forum ini berlangsung limabelas kali dan terakhir berlangsung pada tahun 2005. *Special Representative Meeting (SRM)* menjadi forum yang menggantikan JWG sekaligus pembentukan *Joint Study Group (JSG)*. Selama sembilanbelas kali pertemuan, SRM tidak memberikan hasil signifikan khususnya dalam penentuan *Line of Actual Control (LAC)*. Hal ini menjadi penting karena selama ini Tiongkok dan India belum menemukan kesepakatan bersama atas definisi LAC. Selanjutnya pada SRM kelimabelas pada tahun 2012 dibentuk forum *Working Mechanism on Consultation a Coordination (WMCC) on India-China Affairs*. Namun hingga pertemuan terakhirnya pada November 2017 belum memberikan hasil signifikan bagi permasalahan sengketa perbatasan.



Teori yang diterapkan oleh penulis yakni *Issue Linkage* dengan empat variabel pendukung *Material Linkage*, *Political Linkage*, *Trade Linkage* dan *Organisational Linkage*. Pada variabel *Material Linkage* membahas tentang implementasi CBMs dan pengaruh *state prestige* dalam proses negosiasi sengketa perbatasan. Kurangnya implementasi CBMs merupakan salah satu penghambat resolusi sengketa perbatasan termasuk masalah definisi LAC. Hal ini disebabkan salah satu pihak yakni Tiongkok sering melanggar perjanjian CBMs yang telah disepakati. Pada perjanjian 2005, Tiongkok melanggar beberapa pasal seperti membangun pos militer dan penerjunan pasukan di kawasan dataran tinggi Tibet. Hal ini melanggar pasal VII tentang perlindungan dan perdamaian bagi penduduk di sekitar kawasan perbatasan. Selain itu forum yang telah dibentuk tidak berjalan efektif karena SRM yang telah berjalan selama sembilanbelas kali lebih mengarah ke ekonomi, politik dan budaya. Sementara pembahasan secara intens baru dilakukan pada forum WMCC.

Tiongkok dan India merupakan negara besar yang mempunyai daya untuk menjaga martabat bangsanya di mata internasional. *State Prestige* mempunyai pengaruh besar terhadap keberlangsungan proses negosiasi sengketa perbatasan dan sering disebut sebagai *invisible hand*. Kedua negara mempunyai kapasitas yang berimbang dalam beberapa aspek untuk melakukan persaingan. India mempunyai kewajiban untuk mempertahankan wilayah teritorialnya di sektor timur (Tawang & Arunachal Pradesh) untuk menjaga martabatnya di mata internasional. Sementara Tiongkok pun harus mempertahankan aksi klaimnya untuk menjaga trennya yang

dikenal sebagai negara adidaya. Menjaga *state prestige* tidak hanya pada aspek politik namun juga kapasitas militer maupun infrastruktur di sekitar kawasan perbatasan.

Pada variabel *Political Linkage* membawa dua pembahasan yakni pengaruh Tibet dan Pakistan. Kedua negara ini sama-sama mempunyai peran sentral dan bersentuhan langsung dengan kedua belah pihak di kawasan perbatasan. Tibet merupakan negara yang saat ini dibawah otonomi Tiongkok namun banyak penduduknya membangun pengasingan di India karena tidak setuju dengan status tersebut. Hal tersebut memicu perselisihan karena India membantu dan memfasilitasi orang-orang Tibet untuk membentuk pemerintahan sementara. Hal tersebut dinggap Tiongkok sebagai pelanggaran dan mengganggu urusan dalam negerinya karena Tibet merupakan bagian dari otonomi Tiongkok. Sementara Pakistan merupakan aliansi terkuat Tiongkok pasca perang tahun 1962 dengan penandatanganan *Treaty of Friendship and Cooperation and Good Neighbourly Relations*. Sementara di sisi India, Pakistan merupakan negara dengan angka konflik terbesar di Asia Selatan khususnya dalam sengketa kawasan perbatasan *Pakistan Occupied Kashmir (PoK)*. India merasa terancam dengan kehadiran Tiongkok di wilayah PoK dan membangun beberapa pusat pangkalan militer, infrastruktur bahkan reactor nuklir.

Sementara pada variabel *Trade Linkage* membahas tentang pengaruh perdagangan dan ekonomi interdependensi dalam hubungan bilateral. Sejarah hubungan bilateral dalam bidang ekonomi mulai dengan penandatanganan *India-China Joint Economic Group on Economic Relations and Trade, Science and Technology* dan *Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement*. Interdependensi ekonomi

menjadikan pihak investor akan lebih besar pengaruhnya dalam mempengaruhi langkah resolusi sengketa perbatasan. Selain itu akan menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam perdagangan dan menciptakan persepsi menjatuhkan yang lemah demi kepentingan nasionalnya. *Win-win solution* juga belum dicapai terlihat dari pertumbuhan defisit salah satu pihak yakni India dalam hubungan bilateral ini.

Terakhir pada variabel *Organisational Linkage* membahas tentang posisi South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) dalam sengketa perbatasan. SAARC belum menjadi organisasi regional yang stabil terbukti tigabelas dari tigapuluh satu pertemuan KTT tidak berjalan tepat waktu dan proporsional. Selain itu para anggota SAARC terbelah menjadi kubu-kubu dan lebih memilih forum multilateral di banding regional. Organisasi ini akan memberikan celah bagi internasional untuk melakukan intervensi terhadap urusan internal. Seperti intervensi yang dilakukan Tiongkok dalam sengketa perbatasan India dan Pakistan. Hingga saat ini SAARC belum mempunyai peran dalam sengketa perbatasan Tiongkok-India terlihat dengan absennya pembahasan sengketa dalam forum KTT.

Melihat dari hasil diatas maka dapat dilihat bahwa hambatan resolusi sengketa perbatasan tidak hanya muncul dari kurang efektifnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat namun juga banyak faktor lainnya. Proses negosiasi ternyata dipengaruhi oleh keberlangsungan isu yang muncul di sekitar dua pihak yang bersengketa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam aspek ekonomi atau perdagangan, hubungan bilateral dengan negara tetangga (Pakistan dan Tibet) serta pembenahan organisasi regional agar proses negosiasi dapat berjalan efektif.

## **5.2 Rekomendasi dan Saran**

Penelitian selanjutnya akan lebih menarik bila difokuskan terhadap aktifitas militer dan senjata di kawasan perbatasan Tiongkok-India. Lebih spesifik di kawasan Tibet, Doklam dan Pakistan karena merupakan pusat konflik antara Tiongkok dan India hingga saat ini. Selain itu dapat dianalisis juga pengadaan nuklir sebagai salah satu senjata yang digunakan oleh kedua negara. Hal ini mengingat tes peledakan bom nuklir pada tahun 1998 yang pernah dilakukan India pada tahun 1998 dan memicu Tiongkok untuk mengembangkan pusat penelitian nuklir di sekitar kawasan perbatasan.

## Daftar Pustaka

- Aarten, S. R. (1986). Sino-Indian military build-up over Aksai Chin: China's interests in a geopolitical context. *South Asia Institute*, 2.
- Afridi, M. K., & Khan, A. Z. (2016, February). Pak-China Boundary Agreement: Factors and Indian Reactions. *International Journal of Social Science Studies*, IV(2), 2-3.
- Ahmar, M. (2017, October 11). *China and the South Asian Association of Regional Cooperation*. Retrieved from The Asia Dialogue: <http://theasiadialogue.com/2017/10/11/china-and-the-south-asian-association-of-regional-cooperation/>
- Ahmed, S. H. (2015). Chronology of the Sino Indian Border Dispute. *Sage Publikasi*, V(1-2), 212.
- An. (2011, May 20). *China Asks US to Respect Pak's Sovereignty, Independence*. Retrieved from Economic Times: [http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-05-20/news/29565072\\_1\\_pakistan-s-ambassador-pakistan-china-pakistan-media](http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-05-20/news/29565072_1_pakistan-s-ambassador-pakistan-china-pakistan-media)
- An. (2012, December 31). *Cruise Missiles in Sub Continent: The Sino-Pakistani Nexus*. Retrieved from The Hindu Business: <http://www.thehindubusinessline.in/bline/2005/08/23/stories/2005082300311100.htm>
- Aneja, A. (2017, March 03). *China shifts focus on "eastern sector" as the core of border row with India*. Retrieved from The Hindu: <https://www.thehindu.com/news/international/china-shifts-focus-on-eastern-sector-as-core-of-broder-row-with-india/article17402941.ece>
- Arpi, C. (2015, August 5). *The Panchsheel Agreement*. Retrieved from Indian Defence Review: <http://www.indiandefencereview.com/spotlights/the-panchsheel-agreement/>
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Cyberjaya, Malaysia: Pustaka Pelajar.
- Basu, I. (2001). *India Gains from Chinese WTO Accession*. London: United Press International.
- Bhattacharjee, K. (2016, November 3). *SAARC summit to be cancelled*. Retrieved from The Hindu: <https://www.thehindu.com/news/international/SAARC-summit-to-be-cancelled/article15004093.ece>
- Bhonsale, M. (2018). Understanding Sino-Indian Border Issues: An Analysis of Incidents Reported in the Indian Media. *ORF Occasional Paper*, 24-25.

- Bo, Z. (2018, January 08). *Doklam Standoff with China: Will India learn the Right Lessons or Pay as Nehru Did?* Retrieved from South China Morning Post: <http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2127282/doklam-stand-china-will-india-learn-right-lessons-or-pay>
- Bow, B. (2009). The Politics of Linkage: Power, interdependence and ideas in Canada-US relations. *Vancouver*, 1-5.
- Bradsher, K. (2010, Sept 22). *Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2010/09/23/business/global/23rare.html>
- Caruso, R. (2003). The Impact of International Economic Sanctions on Trade: Empirical Analysis. *Economic Peace, Science and Public Policy*, 49-51.
- Chansoria, M. (2011). India and China: A Case of Constrained Cooperation. *Indian Foreign Affairs Journal*, 99-101.
- Chansoria, M. (2012). Border Resolution Elusive as India, China Holds Fresh Talks. *The Sunday Guardian*, 27-29.
- Chansoria, M. (2012). *India and China: Assessing the Need to Strengthen Bilateral Confidence Building Measures*. Albuquerque: Sandia National Laboratories.
- Chansoria, M. (2012). India and China: Assessing the Need to Strengthen Bilateral Confidence Building Measures. *Sandia Report*, 18-19.
- Chansoria, M. (2014, January 13). *India-China Border Agreement Much Ado About Nothing*. Retrieved from Foreign Policy: <http://foreignpolicy.com/2014/01/13/india-china-border-agreement-much-ado-about-nothing/>
- Chansoria, M. (2014, January 13). *India-China Border Agreement: Much Ado about Nothing*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2014/01/13/india-china-border-agreement-much-ado-about-nothing/>
- Chansoria, M. (2016). Where From, Where To? The Inveterate India-China Talks on the Boundary Question. *Claws Journal*, 1-5.
- Chansoria, M. (2016). Where From, Where To? The Inveterate India-China Talks on the Boundary Question. *Claws Journal*, 12-14.
- Chellaney, B. (2006). *Asian Juggernaut: The Rise of China, India and Japan*. New Delhi: Harper Collins.
- Chellaney, B. (2014, November 27). *Why Tibet Remains the Core Issue in China-India Relations*. Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/brahmachellaney/2014/11/27/why-tibet-remains-the-core-issue-in-china-india-relations/#46caeaf658a0>

- China, T. S. (2006, November 21). *India-China Propose 10-Point Strategy to Further Bilateral Ties*. Retrieved from The State Council The People's Republic of China: [http://www.gov.cn/misc/2006-11/21/content\\_449383.htm](http://www.gov.cn/misc/2006-11/21/content_449383.htm)
- Chuan, S.-c. (1989). Peking's Relations with India and Pakistan. *Issue & Studies*, 5-9.
- Copeland, D. C. (1996). Economic Interdependence and War: A Theory of Trade Expectations. *International Security*, 3-4.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Das, B. (2014). Border Defence Cooperation Agreement; The Icebreaker in Making. *Journal of Defence Studies*, 8(1), 35-36.
- Das, R. N. (2013). *India-China Relations a New Paradigm*. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses.
- Deepak, B. (2005). *India and China: 1904-2004: A Century of Peace and Conflict*. New Delhi: Manak Publications.
- Deng, Y. (2008). *China's Struggle for Status: The Realignment of International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Dolla, V. S. (2011). Technology Trade in India-China Relations: Divergent Dynamics and Implications. *Journal of International Affairs*, 64-66.
- Dutta, P. K. (2017, August 5). *Chinese Media Thinks PLA can annihilate Indian Army. Can They? A Fact Check*. Retrieved from India Today: <https://www.indiatoday.in/india/story/doklam-china-pla-annihilate-indian-army-fact-check-1028184-2017-08-05>
- Eekelen, W. F. (1967). *Indian Foreign Policy and the Border Dispute with China*. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.
- External Publicity Division Ministry of External Affairs Government of India. (1954, October 19). Retrieved from Ministry of External Affairs: [http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/191\\_panchsheel.pdf](http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/191_panchsheel.pdf)
- Fang, T.-s. (2002). The Sino-Indian Border Talks Under the Joint Working Group. *Issues & Studies*, 150-153.
- Ganguly, S. (2004). Border Issues, Domestic Integration and International Security. In F. R. Frankel, & H. Harding, *The India-China Relationship: Rivalry and Engagement* (p. 115). New York: Oxford University Press.
- Garver, J. (2001). *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century*. Washington: University of Washington Press.

- Garver, J. (2011). The Unresolved Sino-Indian Border Dispute: An Interpretation. *China Report*, 47(2), 100-101. doi:10.1177/000944551104700204
- Goertz, Gary, & Diehl, P. F. (1992). *Territorial Changes and International Conflict*. London: Routledge.
- Goldstein, M. C. (1989). *A History Modern of Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State*. California: University of California Press.
- Guota, J., Wurff, R. v., & Junne, G. (1995). *International policies to address the Greenhouse effect: an evaluation of international mechanisms to encourage developing country participation in global greenhouse gas control strategies, especially through the formulation of national programmes*. Amsterdam: Institute for Environmental Studies.
- Gurung, S. K. (2018, July 12). *India-China Row: 8 Disputed Border Areas that China Claims as its own*. Retrieved from The Economic Times: <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/row-with-china-present-tense/articleshow/59729345.cms>
- Haas, E. B. (1980). Why Collaborate?: Issue-Linkage and International Regimes. *World Politics*, 360-367.
- Hannam, P. M. (2015, June 1). *China Holds Key to India's Energy Future*. Retrieved from The Hindu: <https://www.thehindubusinessline.com/opinion/china-holds-key-to-indias-energy-future/article7271640.ece>
- Harrison, S. S. (2010, August 28). *China's Discreet hold on Pakistan's Northern Borderlands*. Retrieved from New York Times: [http://www.nytimes.com/2010/08/27/opinion/27iht-edharrison.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2010/08/27/opinion/27iht-edharrison.html?_r=0)
- Hellstrom, J., & Korkmaz, K. (2011). Managing Mutual Mistrust: Understanding Chinese Perspectives on Sino-Indian Relations. *FOI, Swedish Defence Research Agency Department of Defence Analysis*, 3.
- Hongyi, N. (2009). Explaining Chinese Solutions to Territorial Disputes with Neighbour States. *Chinese Journal of International Politics*, 2, 487. doi:<https://doi.org/10.1093/cjip/pop007>
- Hsu, K. H. (2008). Progress on Sino-Indian Border Negotiations-the Issue of Tawang Ownership. *MtAC Commisioner Meeting*, 10.
- Huang, Y. (2011). The Myth of Economic Complementarity in Sino Indian Relations. *Journal of International Affairs*, 111-115.
- Huchet, J. F. (2008). Between Geostrategic Rivalry and Economic Competition. *China Perspectives*, 3, 50.



- Hyer, E. (2017, December 8). *China's Policy of Conciliation and Reduction and its Impact on Boundary Negotiations and Settlements in the Early 1960s*. Retrieved from Wilson Center: Cold War International History Project:  
<https://www.wilsoncenter.org/publication/chinas-policy-conciliation-and-reduction-and-its-impact-boundary-negotiations-and>
- India, M. C. (2005, April 11). *Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question*. Retrieved from Ministry of External Affairs Government of India:  
<https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6534/Agreement+between+the+Government+of+the+Republic+of+India+and+the+Government+of+the+Peoples+Republic+of+China+on+the+Political+Parameters+and+Guiding+Principles+for+the+Settlement+of+the+IndiaChina+B>
- India, M. C. (2006, May 28). *Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of India and the Ministry of National Defence of the People's Republic of China for Exchanges and Cooperation in the field of Defence*. Retrieved from Ministry of External Affairs Government of India:  
[http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6169/Memorandum\\_of\\_Understanding\\_between\\_the\\_Ministry\\_of\\_Defence\\_of\\_the\\_Republic\\_of\\_India\\_and\\_the\\_Ministry\\_of\\_National\\_Defence\\_of\\_the\\_Peoples\\_Republic\\_of\\_C](http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6169/Memorandum_of_Understanding_between_the_Ministry_of_Defence_of_the_Republic_of_India_and_the_Ministry_of_National_Defence_of_the_Peoples_Republic_of_C)
- India, M. C. (2010, December 16). *Joint Communiqué of the Republic of India and the People's Republic of China*. Retrieved from Ministry of External Affairs government of India: <http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5158/Joint+Communiqu+of+the+Republic+of+India+and+the+Peoples+Republic+of+China>
- India, M. C. (2012, January 17). *India-China Agreement on the Establishment of a Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs*. Retrieved from Ministry of external Affairs Government of India:  
<http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/17963/IndiaChina+Agreement+on+the+Establishment+of+a+Working+Mechanism+for+Consultation+and+Coordination+on+IndiaChina+Border+Affairs>
- India, M. C. (2014, September 19). *Joint Statement between the Republic of India and the People's Republic of China on Building a Closer Developmental Partnership*. Retrieved from Ministry of External Affairs Government of India:  
<http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/24022>
- India, M. C. (2014, October 12). *Press Statement on 15th Meeting of the India-China Joint Working Group on the Boundary Question*. Retrieved from Ministry of External

Affairs Government of India: <http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/5725/Press+Statement+on+15th+Meeting+of+the+IndiaChina+Joint+Working+Group+on+the+Boundary+Question>

India, M. G. (2005, April 11). *Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question*. Retrieved from Media Center Ministry of External Affairs Government of India: <http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6534/Agreement+between+the+Government+of+the+Republic+of+India+and+the+Government+of+the+Peoples+Republic+of+China+on+the+Political+Parameters+and+Guiding+Principles+for+the+Settlement+of+the+IndiaChina+Bo>  
o

India, M. o. (2008, January 14). *A Shared vision for the 21st Century of the Republic of India and the People's Republic of China*. Retrieved from Ministry of External Affairs Government of India : <http://mea.gov.in/outgoing-visit-detail.htm?5145/A+Shared+Vision+for+the+21st+Century+of+the+Republic+of+India+and+the+Peoples+Republic+of+China>

Jain, R. K. (1981). *China–South Asian Relations: 1947–1980*. New Delhi: The Harvester Press.

Jetly, N. (1979). *India China Relations*. New Delhi: Radiant Publishers.

Jha, P. S. (2017). *China-India Relations under Modi: Playng with Fire*. Sage Publications, 158.

Kalha, R. S. (2014). *India-China Boundary Issues: Quest for Settlement*. New Delhi: Pentagon Press.

Kalha, R. S. (2014, July 3). *The McMahon Line: A Hundred Years On*. Retrieved from Institute for Defence Studies and Analyses: [https://idsa.in/idsacomments/TheMcMahonLine\\_rskalha\\_030714](https://idsa.in/idsacomments/TheMcMahonLine_rskalha_030714)

Kant, I. (1957). *Perpectual Peace*. New York: Liberal Arts.

Keshav, M. (2004). *Rapprochement Across the Himalayas: Emerging India-China Relations in Post-Cold War Period*. New Delhi: Kalpaz Publications.

Kondapalli, S. (2007). Eleventh Round of Border Talks: India-CHina Border Dispute. *World Focus*, 415-417.

Koshi, S. (2011). China and India: Awkward Ascents. *Foreign Policy Research Institute*, 563.

Kumar, M. (2015). Sino-Indian Relatins 1950-59. *Sage Publikasi*, V(1-2), 21.

Kumar, V. (2016, November 17). *The South Asian Association for Regional Co-operation: PART One-The Problems of SAARC*. Retrieved from Future Directions:

<http://www.futuredirections.org.au/publication/south-asian-association-regional-co-operation-part-one-problems-saarc/>

- Li, Z. (2010, September 17). *China-India Relations: Strategic Engagement and Challenges*". Retrieved from Aie. Vision: <http://www.ifri.org/?page=contributiondetail&id=6223&lang=uk>
- Maggi, G. (2016). Issue Linkage. In K. Bagwell, & R. W. Staiger, *Handbook of Commercial Policy* (pp. 513-514). Amsterdam: Zoe Kruze.
- Malhotra, A. (2012). Indo-Vietnam Relations: An Answer to Sino-Pak Partnership? *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 71-75.
- Malik, J. M. (1995). China-India in the Post-Soviet Era: The Continuing Rivalry. *The China Quarterly*, 317-320.
- Malik, M. (2010, September 24). *China unveils the Kashmir Card*. Retrieved from China Brief: <https://jamestown.org/program/china-unveils-the-kashmir-card/>
- Marcus, J. (2018, January 26). *China-India Border Tension: Staelite Imagery Shows Docks Plateau Build Up*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42834609>
- Maxwell, N. (1999). Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. *Economic & Political Weekly*, 906-907.
- Maxwell, N. (2011). Why the Sino-Indian Border Dispute is Still Unresolved after 50 Years: A Recapitulation. *Sage Publications*, 71.
- Maxwell, N. (2013). *India's China War*. Dehra Dun: Natraj Publishers.
- Maxwell, N. (2014). China's Border: Settlements & Conflicts: Selected Papers. *Cambridge*, 53(2), 289.
- Mohan, C. R. (2003). *Crossing the Rubicon: The Shaping of India's New Foreign Policy*. New Delhi: Penguin.
- Mugasejati, N. P., & Rais, A. H. (2011). *Politik Kerjasama Internasional: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Institute of International Studies Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Maa.
- Muratbekova, A. (2017). The Sino Indian Border Issue as a Factor for the Development of Bilateral Relations. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1-2.
- Nn. (1975, April 16). *Sikkim Votes to End Monarchy, Merge With India*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/1975/04/16/archives/sikkim-votes-to-end-monarchy-merge-with-india.html>
- Nn. (1989). Prime Minister Rajiv Gandhi's Visit to China. *China Report*, XXV(2), 199-200.

- Nn. (2004, June). *Panchsheel*. Retrieved from External Publicity Division Ministry of External Affairs Government of India:  
[http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/191\\_panchsheel.pdf](http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/191_panchsheel.pdf)
- Nn. (2014, June 28). India-China Joint Press Communique. *Indian Journal of Asian Affairs*, II(1), 53-55.
- Nn. (2016, October 18). *India, China to Set Up Working Mechanism on Border Management*. Retrieved from The Hindu: <https://www.thehindu.com/news/national/India-China-to-set-up-working-mechanism-on-border-management/article13369753.ece>
- Norbu, D. (2001). *China's Tibet Policy*. Surrey: Curzon Press.
- Office, P. I. (2013, October 23). *Border Defence Cooperation Agreement between India and China*. Retrieved from Press Information Bureau Government of India Prime Minister's Office: <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=100178>
- Office, P. I. (2013, October 23). *Joint-Statement - A Vision for Future Development of India-China Strategic and Cooperative Partnership*. Retrieved from Press Information Bureau Government of India Prime Minister's Office:  
<http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=100198>
- Orton, A. (2010). *India's border land disputes, China, Pak, Bangladesh and Nepal*. New Delhi: Epitome Books.
- Panda, J. (2014). India-China Ties: Between Personalities and Principles. *Institute for Defence Studies & Analyses*, 6.
- Pandit, P., Krishnamurty, V., Panda, J., & R.N.Das. (2011, January 7). Wen Jiabao's India Visit: A Strategic Review. *IDSA Issue Brief*, 3.
- Patranobis, S. (2018, April 26). *China says no room for negotiations on Sikkim Standoff with India*. Retrieved from Hindustan Times: <https://www.hindustantimes.com/world-news/china-says-no-room-for-negotiations-on-standoff-ladakh-added-to-dispute-with-india/story-7ZD6hmRscxt9TqAUvGrn7I.html>
- Paul, T. V., & Shankar, M. (2014). *Status Accommodation through Institutional Means: India's Rise and the Global Order*. New York: Cambridge University Press.
- Pokharna, B. (2009). *India-China Relations: Dimensions and Perspectives*. New Delhi: New Century Publications.
- Power, G. F. (2018). *Global Fire Power*. Retrieved from Comparison Results of World Military Strengths : <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=china&country2=india&Submit=COMPARE>
- Ray, S. K. (1984). *Smash and Grab Annexation of Sikkim*. Delhi: Vikas Publishing House.

- Renshon, J. (2015). Losing Face and Sinking Costs: Experimental Evidence on the Judgment of Political and Military Leaders. *International Organizations*, 659-695.
- Richards, C. K. (2015, February). China-India: An analysis of the Himalayan Territorial Dispute. *Indo-Pacific Strategic Papers*, 3.
- Rose, L. E. (1968). The McMahon Line. *Pacific Affairs*, 132-133.
- Sajjanhar, A. (2017, August 11). *The Doklam Standoff - Should India Project its Stand More Vigorously?* Retrieved from Institute for Defence Studies and Analyses: [https://idsa.in/idsacomments/the-doklam-standoff\\_asajjanhar\\_110817](https://idsa.in/idsacomments/the-doklam-standoff_asajjanhar_110817)
- Sawhney, P., & Wahab, G. (2017). *Dragon on Our Doorstep: Managing China Through Military Power*. New Delhi: Aleph Book Company Rupa Publications.
- Scott, D. (2008). Sino-Indian Security Predicaments for the Twenty First Century. *Asian Security*, 244-5.
- Shrivastava, V. K. (2016). *Sino-Indian Boundary Dispute and Indo Centric Reflections on China's Military Capabilities, thoughts and Options in the Near Future*. New Delhi: Vivekananda International Foundation.
- Sidhu, W. P., & Yuan, J.-D. (1999). Cooperative Monitoring for Confidence Building: A Case Study of the Sino Indian Border Areas. *CMC Occasional Papers*, XIII, 16-17.
- Sidhu, W. P., & Yuan, J.-D. (2001). Resolving the Sino-Indian Border Dispute: Building Confidence Through Cooperative. *Asian Survey*, 352.
- Sidhu, W. P., & Yuan, J.-D. (2001). Resolving the Sino-Indian Border Dispute: Building Confidence through Cooperative Monitoring. *Asian Survey*, XLI(2), 354-356.
- Sidhu, W. P., & Yuan, J.-D. (2003). *China and India: Cooperation or Conflict*. New Delhi: Lynne Rienner Publishers.
- Singh, B. K. (2011). Sino-Indian Economic Strategic Dialogue: Beyond the Beijing Round. *IPCS Issue Brief*, 177-178.
- Singh, Z. D. (2011). After the Hiatus: India-China Border Diplomacy since the 1970s. *Sage Publications*, 47(2), 87.
- Singh, Z. D. (2011). The Himalayan Stalemate Retracing the India-China Dispute. (B. G. Kanwal, Ed.) *Manekshaw Paper*, 27, 12-14.
- Subramanyam, B. P. (2013, September 30). *China: Task Ahead for India*. Retrieved from India Defence Review: <http://www.indiandefencereview.com/spotlights/china-task-ahead-for-india/>
- Thapliyal, S. (2010). Sino-Indian Border Impasse: Strategy for Resolution. *Claws Journal*, 203-204.

- Tikhonova, P. (2017, August 7). *China vs India War: Why Indian Army is Too Weak to Fight*. Retrieved from Valuewalk: <https://www.valuewalk.com/2017/08/china-vs-india-war-army/>
- TNN. (2011, may 21). *Antony expresses concern over deepening China-Pak strategic nexus*. Retrieved from The Times of India: <https://timesofindia.indiatimes.com/india/Antony-expresses-concern-over-deepening-China-Pak-strategic-nexus/articleshow/8478165.cms?referral=PM>
- Tripathi, E. D. (2012). *India China Relations: Future Perspective*. New Delhi: Vij Books.
- UNODA. (1995, May 11). *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)*. Retrieved from UNODA United Nations Office for Disarmament Affairs: <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>
- Varma, K. J. (2010, July 3). *China-Pak may contemplate joint-action against Terror Groups*. Retrieved from DNA: [http://www.dnaindia.com/world/report\\_china-pak-maycontemplate-joint-action-against-terror-groups\\_1404803](http://www.dnaindia.com/world/report_china-pak-maycontemplate-joint-action-against-terror-groups_1404803)
- Vombathkere, A. (2014, January 9). *Where does the Indian Army stand in COmparison to Chinese Army (in terms of Weaponry/Tactics)?* Retrieved from Quora: <https://www.quora.com/Where-does-the-Indian-Army-stand-in-comparison-to-the-Chinese-Army-in-terms-of-weaponry-tactics>
- Wang, K. (2014). Rethinking Chinese Territorial Disputes: How the Value of Contested Land Shapes Territorial Policies. *Publicly Accessible Penn Dissertations*, 1-6.
- Wang, L., & Shakya, t. (2009). *The Struggle for Tibet*. New York: Verso.
- Warner, J. F. (2016). Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and COoperation on the River Meuse. *Globalizations*, 6-7.
- Warner, J. F. (2016). Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary CONflict and Cooperation on the River Meuse. . *Globalizations*, 6-8.
- Westcott, S. (2015). The role of 'prestige' in creating intractable interstate border disputes: the case of the Sino-Indian border dispute. *International Studies Association*, 1-3.
- White, S. (2015). A Critical Disconnect: The role of SAARC in Building the DRM Capacities of South Asian Countries. *Broking LSE Projrct on Internal Displacement*, 7.
- Wiegand, K. E. (2011). *Enduring Territorial Disputes: Strategies of Bargaining, Coercive Diplomacy & Settlement*. *Studies in Security and International Conflict*. Georgia: University of Georgia Press.
- Xuecheng, L. (2011). Look Beyond the Sino Indian. *China Report*, 47(2), 148. doi:10.1177/000944551104700207

Yang, A. (2010, June 23). *China may finance Pakistan reactors*. Retrieved from China Daily:  
[http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-06/23/content\\_10006302.htm](http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-06/23/content_10006302.htm)

Young, O. R. (1999). *The Effectiveness of International Environmental Regimes: Causal connections and behavioral mechanisms*. Cambridge: MIT Press.